

RENCANA KERJA RENJA 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BRANDING KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto
Full of Majapahit Creatives



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RENJA ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna RENJA ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan RENJA di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Mei 2023

Pt. KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001

DAFTAR ISI

Pengantar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i
Daftar Isi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ii
Daftar Tabel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	iii
BAB I	PENDAHULUAN										
	1.1	Latar Belakang.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	1.2	Landasan Hukum	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	.	.	.	.	.	.	.	.	5
	1.4	Sistematika Penulisan.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022										
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	.	.	.	.	.	.	.	.	10
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2022	.	.	.	.	.	.	.	.	31
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	.	.	.	.	.	.	.	.	41
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.	.	.	.	.	.	.	.	44
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan.	.	.	.	.	.	.	.	.	54
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN										
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.	.	.	.	.	.	.	.	56
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024.	.	.	.	.	.	.	.	.	57
	3.3	Program dan Kegiatan	.	.	.	.	.	.	.	.	58
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.										88
BAB V	PENUTUP										119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah – hal 11
Tabel	: Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran – hal 38
Tabel 2.2	: Pencapaian kinerja Pelayanan DP2KBP2 – hal. 40
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2022 – hal 45
Tabel 2.4	: usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun Anggaran 2023 – hal 54
Tabel TC-33	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025 - hal 62
Tabel 4.1	: Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggran 2024 p– hal 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan dengan upaya-upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan anak melalui penguatan kelembagaan gender dan anak, meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara Program Keluarga Berencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga merupakan strategi dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dengan berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Untuk itu baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Jogjakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

- nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan APBD 2020. Didalamnya mencantumkan kewajiban bagi OPD untuk menyusun analisis gender dan menuangkan dalam GBS serta dilampirkan dalam RKA.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
33. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
35. Keputusan Kelapa Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/1868/KEP/416-101/2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dimaksudkan agar :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun satu tahun.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan Renstra Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 kedalam operasionalisasi program
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif
- c. Menyediakan dokumen rencana kerja perangkat daerah sebagai acuan operasional program
- d. Menentukan strategi untuk peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber dana organisasi

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja tahun 2024, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan RPJMD serta isu

strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1.4. Sistemmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun dari hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

2.6.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rentra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2025.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Ranwal Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto per tanggal 30 Desember 2022 sebesar **84,67 %** sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 18.760.987.400,00
Refokusing PAPBD	<u>Rp. 1.319.712.956,00</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 20.080.700.356,00
Realisasi	<u>Rp. 17.001.692.415,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 3.079.007.941,00</u>

Sedangkan anggaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebesar Rp 20.080.700.356,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 %	83,28 %	83,28 (A)	83,19 (A)	83,19 (A)	83,78 (A)	-	-
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	90 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	15 Dok	300 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	5 Dokumen	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	15 Dok	300 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	255 %	264 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	42 bulan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	65,57 %	-	-	-	-	-	-	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	53 Orang	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Kursi kerja pejabat dan meja rapat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	18 Unit	54 Unit	300 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin yang Di Sediakan	240 Kotak	356 ktk	356 ktk	356 ktk	100 %	356 ktk	1.308 kotak	545 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	100 %	130.802 lbr	292.406 lbr	300 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
	Penyediaan Bahan / Material	Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kudapan yang Di Sediakan	175 kotak	100 kotak	100 kotak	100 kotak	100 %	175 kotak	375 kotak	214 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	172 kali	172 kali	172 kali	172 kali	100 %	172 kali	516 kali	300 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	5 Orang	5 orang	5 orang	5 orang	100 %	5 orang	15 orang	300 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	809 Unit	809 unit	809 unit	809 unit	100 %	809 unit	2.427 unit	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100 %	4 Gedung	12 Gedung	300 %
		Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %
		Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	82,14%	78,57 %	78,57 %	78,57 %	100 %	80,36 %	241 %	60 %
		Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	54 OPD	54 OPD	54 OPD	100 %	86 OPD	194 OPD	359 %
		Jumlah OPD yang dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan PUG	58 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100 %	58 OPD	116 OPD	200 %
		Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Focal Point	28 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100 %	28 OPD	86 OPD	307 %
		Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban	40 Orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha								
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah PEKKA dan perempuan korban kekerasan yang dilatih berwirausaha	40 Orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	90 Orang	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan perempuan pengambil keputusan yang mendapatkan pembinaan di bidang politik	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepala desa yang mendapat pembinaan terkait komitmen pemerintah desa dalam penanganan perempuan dan anak	54 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	40 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 Orang	14 Mitra kerja/ Jejaring	14 Mitra kerja/ Jejaring	14 Mitra kerja/ Jejaring	100 %	65 Orang	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (APBD dan DAK NON FISIK BIDANG PP)	- Jumlah lintas sektor yang bersinergi dengan P2TP2A (APBD)	60 Orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Org	120 Org	200 %
		- Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)	65 Orang	65 Org	65 Org	65 Org	100 %	65 org	195 Org	300 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja/jejaring dapat bersinergi dengan P2TP2A	-	14 mitra kerja/jejaring	14 mitra kerja/jejaring	14 mitra kerja/jejaring	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	10 org	10 Org	10 Org	10 Org	-	10 Orang	30 org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	43 Orang	33 Org	33 Org	33 Org	100 %	43 Orang	113 Org	262 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dari P2TP2A	5 Orang	-	-	-	-	3 Orang	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas yang Mendapat Pengetahuan, Pelayanan dan Pendampingan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	75 Orang	30 Org	30 Org	30 Org	100 %	40 orang	100 Org	133 %
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	49,34%	16,45 %	16,45 %	16,45 %	100 %	38,89%	71,79 %	1,45 %
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	72 orang	72 Org	72 Org	72 Org	100 %	72 Orang	216 Org	300 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa	72 orang	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	72 orang	144 Org	200 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	-	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	-	-	-
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	93,75%	89,58 %	89,58 %	89,58 %	100 %	91,67%	270 %	2,8 %
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %
	Program Pemenuhan Hak Anak	Prosentase kecamatan layak anak	33,96%	27,78 %	27,78 %	27,78 %	100 %	33,33%	88,89 %	2,62 %
		Prosentase desa kelurahan layak anak	10,56%	6,58 %	6,58 %	6,58 %	100 %	8,55%	21,71 %	3,30 %
	Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	80 Org	80 Org	80 Org	100 %	136 Orang	296 Org	218 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak yang terlaksana	40 orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 orang	120 Org	300 %
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah kepala desa yang dapat mengikuti monev terkait desa layak anak	40 orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	175 Org	175 Org	175 Org	100 %	175 Orang	525 Org	300 %
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Kualitas Hidup Anak	95 orang	95 Org	95 Org	95 Org	100 %	95 Orang	285 Org	300 %
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak yang Terlaksana	50 orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	50 Orang	150 %	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	30 Orang	30 Org	30 Org	30 Org	100 %	30 orang	90 Org	300 %
	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	41,82%	39,62 %	39,62 %	39,62 %	100 %	40,74%	119 %	2,9 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	95 orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	95 Orang	195 Org	205 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi pernikahan anak	30 orang	-	-	-	-	30 Orang	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	- Jumlah korban yang mendapat atensi (APBD)	10 orang	10 Org	10 Org	10 Org	100 %	10 Orang	30 Org	300 %
		- Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam	10 orang	65 Org	65 Org	65 Org	100 %	65 orang	195 Org	195 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	pencegahan kekerasan / TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)								
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	171 Org	171 Org	171 Org	100 %	125 Orang	467 Org	373 %
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Mengikuti Rakor	50 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan	- Jumlah forum anak yang memahami tentang perlindungan khusus anak	10 orang	56 Org	56 Org	56 Org	100 %	56 orang	168 Org	168 %
	khusus kewenangan kab/kota	- Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan (DAK NON FISIK BIDANG PP)	25 orang	10 Org	10 Org	2 Org	20 %	10 orang	22 Org	88 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Peneyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	25 orang	25 Org	25 Org	25 Org	100 %	25 Orang	75 Org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	148 Org	148 Org	148 Org	100 %	108 Orang	404 Org	374 %
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	108 Org	108 Org	108 Org	100 %	108 Org	324 Org	300 %
	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	170 Org	170 Org	170 Org	100 %	100 orang	440 Org	440 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	170 Org	170 Org	170 Org	100 %	100 orang	272 Org	272 %
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk dan mendapatkan sosialisasi dan advokasi kependudukan	5 sekolah	-	-	-	-	-	-	-
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	1.170.748 jiwa	1.170.748 jiwa	100 %	1.169.760 jiwa	3.510.268 Jiwa	300 %
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	-	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil program KKBPK yang tersusun	1 Buku	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 buku	3 Buku	300 %
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Jumlah Kampung KB 38 Kampung KB yang mempunyai rumah data program KKBPK	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 kampung	114 Kampung KB	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program KKBPK di Sektor Lain									
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pendataan yang Memahami Teknis Pendataan	80 Org	65 Org	65 Org	65 Org	100 %	80 orang	210 Org	262 %
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru, KB Aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet Neet yang Dievaluasi	120 Org	97 Org	97 Org	97 Org	100 %	120 orang	314 Org	261 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pengelola Data yang Memahami Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	130 Org	105 Org	105 Org	105 Org	100 %	130 orang	340 Org	261 %
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,52%	80,55 %	80,55 %	80,55 %	100 %	80,56%	241,66 %	300 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	50 Media Komunikasi	50 Media Komunikasi	50 Media Komunikasi	100 %	50 media komunikasi	150 Media Komunikasi	300 %
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja yang Mendapat Advokasi tentang Program KKBPK	50 orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	50 orang	150 Org	300 %
	Penyediaan dan Pendistribusian Sarana KIE Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan didistribusikan	-	50 sarana/media KIE	50 sarana/media KIE	50 sarana/media KIE	100 %	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	77 media komunikasi	77 media komunikasi	77 media komunikasi	100 %	50 media komunikasi	204 media komunikasai	254 %
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak Elektronik dan Media Lainnya yang Digunakan Promosi sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	50 media massa	50 media massa	50 media massa	50 media massa	100 %	50 media massa	150 Media massa	300 %
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	Jumlah Masyarakat dan Lintas Sektor yang Mengetahui Harga NAS sehingga Program KKBPK bisa Diterima	200 orang	100 org	100 org	100 org	100 %	200 orang	400 Org	200 %
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah sarana prasarana di balai penyuluh KKBPK yang di kelola	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	100 %	18 balai penyuluh	54 Balai penyuluh	300 %
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Orang	60 Org	60 Org	60 Org	100 %	60 Orang	180 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IPM yang dibina program KKBPK oleh PLKB	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	-	0
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	Jumlah Penyuluh PKB / PLKB yang Mendapat Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	65 orang	18 balai penyuluh KB	18 balai penyuluh KB	18 balai penyuluh KB	100 %	65 orang	-	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah PUP, pemakaian kontrasepsi, kelompok tribina, UPPKS, PIK R dapat di tingkatkan	2.315 orang	2.315 orang	2.315 orang	2.315 orang	100 %	2.315 orang	6.945 org	300 %
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alokon	26.929 alokon	59.330 alokon	59.330 alokon	100 %	26.929 alokon	145.589 alkon	540 %
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	- Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	42 faskes	126 faskes	126 faskes	126 faskes	100 %	42 faskes	294 faskes	700 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringan (DAK NON FISIK)	yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP - Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	120 Orang	-	-	-	100 %	120 orang	-	-
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Jumlah Pengguna MKJP yang Meningkat lewat Promosi Program KKBPK - Jumlah pengguna MKJP yang meningkat lewat promosi program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) (DAK NON FISIK BOKB)	64.801 orang 209 akseptor	36 Org 3470 Akseptor	36 Org 3338 Akseptor	36 Org 3338 Akseptor	100 % 96 %	108 orang 209 Akseptor	180 Org 6.885 Akseptor	0,28 % 32,94 %
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan	Jumlah Petugas Faskes dan Petugas KB yang Memahami Kebutuhan Alkon	108 orang	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	108 orang	180 Org	166 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sarana Penunjang Pelayanan KB									
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional PLKB/PKB	3 jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	3 jenis	5 jenis	166 %
	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Kelangsungan ber- KB Meningkat	480 akseptor	360 akseptor	360 akseptor	360 akseptor	100 %	480 akseptor	1.200 akseptor	720 %
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Pelayanan KB yang Dapat Ditingkatkan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	43 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	100 %	43 Faskes	127 faskes	295 %
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah KB Pasca Persalinan Meningkat	150 orang	120 org	120 org	120 org	100 %	175 orang	415 org	276 %
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mutu dan Kualitas Pelayanan KB Meningkat	150 akseptor	120 tenaga pelayanan	120 tenaga pelayanan	120 tenaga pelayanan	100 %	150 tenaga pelayanan	390 tenaga pelayanan	260 %
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Baru Pria Meningkat	40 akseptor	88 akseptor	88 akseptor	88 akseptor	100 %	150 akseptor	326 akseptor	8,15 %
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah lintas sektor yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB	38 Lintas Sektor	-	-	-	-	38 Lintas Sektor	-	-
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kerja Sama Lintas Sektor tentang Program KKBPk di Kampung KB	180 lintas sektor	100 lintas sektor	100 lintas sektor	100 lintas sektor	100 %	180 lintas sektor	380 lintas sektor	380 %
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah biaya operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang terpenuhi	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah biaya operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang terpenuhi	38 kampung KB	38 kampung KB	38 kampung KB	38 kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,81%	97,75 %	97,75 %	97,75 %	100 %	97,81%	293 %	299 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	549 Kelompok	549 Kelompok	100 %	1.066 Kelompok	2.164 kelompok	203 %
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB yang dibina	100 Orang	250 Org	250 Org	250 Org	100 %	100 orang	850 org	850 %
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana penugasan DAK Fisik yang terpenuhi (Pengadaan Kit Siap Nikah dan BKB Kit Stunting)	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	6 jenis	300 %
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola	Jumlah pengelola kelompok BKB, BKR, BKL yang di latih	100 Orang	322 Org	250 Org	250 Org	100 %	100 orang	600 Org	500 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah remaja yang mendapat advokasi	100 Orang	100 Org	100 Org	100 Org	100 %	100 orang	300 org	300 %
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sasaran poktan BKB yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	90 orang dan 36 Desa Lokus Stanting	54 Org	54 Org	54 Org	100 %	90 orang dan 36 Desa Lokus Stanting	-	-
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	- Jumlah Pengelola Kelompok UPPKS yang Terpenuhi	36 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	100 %	36 Kelompok	60 kelompok	166 %
	dan Pemberdayaan	- Jumlah sasaran poktan BKB (orang tua hebat) yang mendapatkan promosi dan	1.000 Org	1.000 Org	1.000 Org	1.000 Org	100 %	1.000 Org	3.000 org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ekonomi Keluarga/UPPKS) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	sosialisasi (DAK NON FISIK BOKB) - Jumlah sasaran poktan, BKB, BKL, BKR, UPPKS dan PIK-R yang mendapatkan promosi dan sosialisasi tentang Kespro dan Stanting (DAK NON FISIK BOKB)	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 %	100 Org	300 org	300 %
	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah anggota kelompok poktan BKL yang aktif	90 Orang	54 Org	54 Org	54 Org	100 %	90 orang	198 org	220 %
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 Orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	50 Org	150 Org	150 %
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan	50 Orang	150 Org	150 Org	150 Org	100 %	50 Orang	350 Org	700 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50 Orang	150 Org	150 Org	150 Org	100 %	50 Orang	350 Org	700 %

EVALUASI RENJA TAHUN 2022 (E.81)

No 1	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	Aksi								
							I		II		III		IV													
				5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi																							
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,78	6.314.423.390	0	0	83,28	5.957.325.256	0,00	574.840.363	0	1.807.393.016	84	1.453.207.914	0	1.496.467.087	83,87	100,71%	5.331.908.380	89,50%	83,87	5.331.908.380	0	0	
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90	15.000.000	0	0	90	15.000.000	7,20	1.079.000	9	1.300.000	53	6.235.000	21,2	4.491.000	90,00	100,00%	13.105.000	87,37%	0	13.105.000	0	0	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen	5	10.000.000	5	10.000.000	5	7.500.000	0,00	0	0	0	5	5.135.000	0	1.607.500	5,00	100,00%	6.742.500	89,90%	5	16.742.500	100,00%	167,43%	
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Laporan	5	5.000.000	5	5.000.000	5	7.500.000	2,00	1.079.000	0	1.300.000	0	1.100.000	3	2.883.500	5,00	100,00%	6.362.500	84,83%	5	11.362.500	100,00%	227,25%	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89	5.516.800.990	0	0	86	5.322.816.000	9,00	505.541.500	31	1.705.454.820	24	1.358.619.433	20,93	1.192.830.066	84,67	98,45%	4.762.445.819	89,47%	0	4.762.445.819	0	0	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.1 Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	32	5.516.800.990	32	5.516.800.990	39	5.322.816.000	39,00	505.541.500	0	1.705.454.820	0	1.358.619.433	0	1.192.830.066	39,00	100,00%	4.762.445.819	89,47%	32	10.279.246.809	100,00%	186,33%		

		3. Administarsi Umum Perangkat Daerah	3.1 Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90	258.000.000	0	0	90	218.129.000	15,60	25.280.000	21	34.197.065	22	35.216.000	31,55	100.030.000	90,00	100,00%	194.723.065	89,27%	0	194.723.065	0	0	
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	50.000.000	18	50.000.000	9	68.679.000	0,00	0	5	10.006.065	4	16.875.000	0	38.261.000	9,00	100,00%	65.142.065	94,85%	18	115.142.065	100,00%	230,28%	
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1 Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	240	12.000.000	240	12.000.000	225	12.000.000	84,00	2.100.000	84	2.100.000	0	0	57	4.494.000	225,00	100,00%	8.694.000	72,45%	240	20.694.000	100,00%	172,45%	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.1 Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	130,802	41.000.000	130,802	41.000.000	215	25.000.000	0,00	2.636.000	0	0	0	2.636.000	215	19.720.000	215,00	100,00%	24.992.000	99,97%	130,802	65.992.000	100,00%	160,96%	
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.1 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	3,00	1.950.000	3	1.950.000	3	1.950.000	3	1.950.000	12,00	100,00%	7.800.000	86,67%	12	16.800.000	100,00%	186,67%	
		5. Penyediaan Bahan / Material	3.1 Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4	29.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000	1,00	4.774.000	1	8.739.000	1	6.960.000	1	7.149.000	4,00	100,00%	27.622.000	95,25%	4	56.622.000	100,00%	195,25%	
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	3.1 Jumlah Kudapan yang Disediakan	175	7.000.000	175	7.000.000	100	7.000.000	18,00	450.000	40	1.747.000	0	0	42	2.526.000	100,00	100,00%	4.723.000	67,47%	175	11.723.000	100,00%	167,47%	
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.1 Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	172	110.000.000	172	110.000.000	142	67.450.000	29,00	13.370.000	28	9.655.000	21	6.795.000	64	25.930.000	142,00	100,00%	55.750.000	82,65%	172	165.750.000	100,00%	150,68%	

		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	4.1Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90	274.622.400	0	0	90	149.051.250	23,90	33.380.563	23	32.430.231	15	24.674.206	28,28	36.468.021	90,00	100,00%	126.953.021	85,17%	0	126.953.021	0	0	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.1 Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor DP2KBP2 dan rumah aman	12	210.000.000	12	175.000.000	12	84.428.850	3,00	17.224.963	3	18.428.711	3	11.749.726	3	23.543.541	12,00	100,00%	70.946.941	84,03%	12	245.946.941	100,00%	117,12%	
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.1 Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 12 Bulan	5	64.622.400	5	64.622.400	5	64.622.400	5,00	16.155.600	0	14.001.520	0	12.924.480	0	12.924.480	5,00	100,00%	56.006.080	86,67%	5	120.628.480	100,00%	186,67%	
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	5.1Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	90	250.000.000	0	0	90	205.529.006	6,37	9.559.300	23	34.010.900	19	28.463.275	42	116.433.000	90,00	100,00%	188.466.475	91,70%	0	188.466.475	0	0	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1 Jumlah Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	809	105.000.000	809	105.000.000	189	119.825.400	40,00	7.359.300	144	24.888.700	5	22.176.275	0	52.247.000	189,00	100,00%	106.671.275	89,02%	809	211.671.275	100,00%	201,59%	
		2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	4	125.000.000	4	125.000.000	4	65.703.606	0,00	0	1	6.242.200	1	5.057.000	2	52.211.000	4,00	100,00%	63.510.200	96,66%	4	188.510.200	100,00%	150,81%	

		3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah Peralatan gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	5,00	2.200.000	7	2.880.000	4	1.230.000	5	11.975.000	21,00	100,00%	18.285.000	91,43%	21	38.285.000	0	0	
		6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.1IP ASN Perangkat Daerah	65,9	65.000.000	0	0	70	46.800.000	0,00	0	0	0	0	0	58,43	46.215.000	58,43	83,47%	46.215.000	98,75%	0	46.215.000	0	0	
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	6.1 Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	53	65.000.000	0	0	39	46.800.000	0,00	0	0	0	0	0	39	46.215.000	39,00	100,00%	46.215.000	98,75%	0	46.215.000	0	0	
			1.2 Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	-	0	0	1	0	0,00	0	0	0	1	0	0	-	1,00	100,00%	0	0,00%	1	-	0	0	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)																							
		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.1 Prosentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	87,5	310.000.000	53	0	80,36	562.969.000	0,00	7.354.015	0	17.104.420	0	41.054.730	80,36	486.565.850	80,36	100,00%	552.079.015	98,07%	133,36	552.079.015	215,1%	0	
		1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran respinsif gender	86	150.000.000	0	0	93	135.000.000	0,00	2.963.600	0	0	93	29.902.350	0	99.131.650	93,00	100,00%	131.997.600	97,78%	0	131.997.600	0	0	

		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.1 Jumlah OPD yang dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan PUG	58	100.000.000	0	0	57	10.000.000	0,00	766.000	0	0	57	9.090.250	0	-	57,00	100,00%	9.856.250	98,56%	0	9.856.250	0	0
		2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1.1 Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Focal Point	28	50.000.000	0	0	36	25.000.000	0,00	2.197.600	0	0	36	20.812.100	0	1.400.000	36,00	100,00%	24.409.700	97,64%	0	24.409.700	0	0
		3. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1.1 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	304	100.000.000	0	0	304	100.000.000	0,00	0	0	0	0	0	304	97.731.650	304,00	100,00%	97.731.650	97,73%	0	97.731.650	0	0
		2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1Jumlah petugas Gugus Tugas PPA yang dievaluasi melalui lomba	90	100.000.000	0	0	80	427.969.000	2,00	4.390.415	77	17.104.420	1	11.152.380	0	387.434.200	80,00	100,00%	420.081.415	98,16%	0	420.081.415	0	0

		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	50	50.000.000	0	0	100	367.144.000	2,00	4.390.415	7	7.709.820	1	11.152.380	90	337.529.800	100,00	100,00%	360.782.415	98,27%	0	360.782.415	0	0
		2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah petugas yang mendapat Pengetahuan, Pelayanan dan Pendampingan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	40	50.000.000	0	0	70	10.000.000	0,00	0	70	9.394.600	0	0	0	-	70,00	100,00%	9.394.600	93,95%	0	9.394.600	0	0
		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	50.825.000	0	0	100	50.825.000	0,00	0	0	0	0	0	100	49.904.400	100,00	100,00%	49.904.400	98,19%	0	49.904.400	0	0
		2. Program Perlindungan Perempuan	1.2 Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100	395.499.000	0	0	100	144.908.197	0,00	0	0	12.154.900	0	114.824.000	100	57.245.500	100,00	100,00%	184.224.400	127,13%	100	184.224.400	344,83%	0
		1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	1.1Jumlah jejaring yang memahami aplikasi SIMFONI PPA dan bersinergi	65	77.155.000	0	0	40	18.044.638	0,00	0	0	0	40	49.368.600	0	17.858.000	40,00	100,00%	67.226.600	372,56%	0	67.226.600	0	0

		Kabupaten / Kota	dengan P2TP2A																							
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	1.1 Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	40	50.000.000	0	0	40	18.044.638	0,00	0	0	0	40	49.368.600	0	17.858.000	40,00	100,00%	67.226.600	372,56%	0	67.226.600	0	0	
		2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	2.1Jumlah anggota P2TP2A yang mengikuti rakor	108	218.344.000	0	0	108	116.863.559	0,00	0	50	12.154.900	58	55.507.900	0	39.387.500	108,00	100,00%	107.050.300	91,60%	0	107.050.300	0	0	
		1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	2.1 Jumlah Mitra Kerja /Jejaring yang dapat bersinergi dengan P2TP2A	14	50.000.000	0	0	50	50.000.000	0,00	0	50	11.067.000	0	31.892.500	0	-	50,00	100,00%	42.959.500	85,92%	0	42.959.500	0	0	

		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK BIDANG PP)	2.1 Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	10	168.344.000	0	0	58	66.863.559	0,00	0	0	1.087.900	58	23.615.400	0	39.387.500	58,00	100,00%	64.090.800	95,85%	0	64.090.800	0	0	
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.1 Jumlah pengurus tugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	43	100.000.000	0	0	70	10.000.000	0,00	0	0	0	70	9.947.500	0	-	70,00	100,00%	9.947.500	99,48%	0	9.947.500	0	0	
		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.1 Jumlah Petugas yang Mendapatkan Pengetahuan, Pelayanan dan Pendampingan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	40	50.000.000	0	0	70	10.000.000	0,00	0	0	0	70	9.947.500	0	-	70,00	100,00%	9.947.500	99,48%	0	9.947.500	0	0	
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.3 Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	98,68	100.000.000	72,2	0	38,99	10.000.000	0,00	912.000	0	175.200	0	8.562.550	33,31	-	33,31	85,65%	9.649.750	96,50%	105,51	9.649.750	110,37%	0	

		1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.1Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	72	100.000.000	0	0	30	10.000.000	0,00	912.000	0	175.200	30	8.562.550	12	-	42,00	140,00%	9.649.750	96,50%	0	9.649.750	0	0	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	1.1 Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa	72	100.000.000	0	0	30	10.000.000	0,00	912.000	0	175.200	30	8.562.550	0	-	30,00	100,00%	9.649.750	96,50%	0	9.649.750	0	0	
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1.4 Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100	100.000.000	83,9	0	91,67	25.000.000	0,00	0	0	0	0	24.287.000	91,67	-	91,67	100,00%	24.287.000	97,15%	175,57	24.287.000	204,39%	0	
		1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.1Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1	100.000.000	0	0	1	25.000.000	0,00	0	0	0	1	24.287.000	0	-	1,00	100,00%	24.287.000	97,15%	0	24.287.000	0	0	
		1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten /Kota	1.1 Jumlah Profil Gender dan Anak yang disusun	1	100.000.000	0	0	1	25.000.000	0,00	0	0	0	1	24.287.000	0	-	1,00	100,00%	24.287.000	97,15%	0	24.287.000	0	0	
			Kabupaten Layak Anak (KLA)																							

		1. Program Perlindungan Khusus Anak	1.1 Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	44,83	590.489.000	82,64	0	40,74	232.813.903	6,10	38.307.400	0	43.492.500	0	15.000.000	34,64	131.487.600	40,74	100,00%	228.287.500	98,06%	123,38	228.287.500	145,08%	0	
		1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1.1Jumlah petugas dan korban dalam pencegahan kekerasan	95	57.155.000	0	0	10	28.044.637	0,00	4.203.000	10	5.200.000	0	0	0	18.036.000	10,00	100,00%	27.439.000	97,84%	0	27.439.000	0	0	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	1.1 Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi pernikahan anak	30	20.000.000	0	0	10	10.000.000	0,00	4.203.000	10	5.200.000	0	0	0	-	10,00	100,00%	9.403.000	94,03%	0	9.403.000	0	0	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	1.1 Jumlah korban yang mendapat atensi (APBD)	10	10.000.000	0	0	500	18.044.637	0,00	0	0	0	0	0	500	18.036.000	500,00	100,00%	18.036.000	99,95%	0	18.036.000	0	0	

		2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.1Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125	433.334.000	0	0	125	170.228.559	20,00	34.104.400	50	29.352.500	0	15.000.000	55	89.511.200	125,00	100,00%	167.968.100	98,67%	0	167.968.100	0	0
		1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah Anggota P2TP2A yang Mengikuti Rakor	50	50.000.000	0	0	30	18.365.000	15,00	9.416.000	0	0	0	0	15	8.361.200	30,00	100,00%	17.777.200	96,80%	0	17.777.200	0	0
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah forum anak yang memahami tentang perlindungan khusus anak (APBD)	56	50.000.000	0	0	200	91.863.559	0,00	9.688.400	50	14.352.500	0	0	150	66.150.000	200,00	100,00%	90.190.900	98,18%	0	90.190.900	0	0
		3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah Anggota P2TP2A yang Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	25	165.000.000	0	0	5	60.000.000	5,00	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	5,00	100,00%	60.000.000	100,00%	0	60.000.000	0	0

		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	3.1Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108	100.000.000	0	0	108	34.540.707	0,00	0	108	8.940.000	0	0	0	23.940.400	108,00	100,00%	32.880.400	95,19%	0	32.880.400	0	0	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	3.1 Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108	100.000.000	0	0	322	10.000.000	0,00	0	322	8.940.000	0	0	0	-	322,00	100,00%	8.940.000	89,40%	0	8.940.000	0	0	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (SILFA DAK TAHUN 2021)	3.1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	50	24.540.707	0	0	50	24.540.707	0,00	0	0	0	0	0	50	23.940.400	50,00	100,00%	23.940.400	97,55%	0	23.940.400	0	0	
		2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.2 Prosentase kecamatan layak anak	55,56	368.267.400	90	0	33,33	80.000.000	0,00	6.025.000	0	49.343.100	0	20.957.000	33,33	-	33,33	100,00%	76.325.100	95,41%	123,33	76.325.100	137,03%	0	

		1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136	100.000.000	0	0	18	60.000.000	0,00	6.025.000	18	49.343.100	0	3.855.000	0	-	18,00	100,00%	59.223.100	98,71%	0	59.223.100	0	0	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1 Jumlah Lintas Sektor Terkait yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	40	50.000.000	0	0	40	10.000.000	40,00	6.025.000	0	0	0	3.855.000	0	-	40,00	100,00%	9.880.000	98,80%	0	9.880.000	0	0	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1 Jumlah Kepala Desa yang Dapat Mengikuti Monev terkait Desa Layak Anak	40	50.000.000	0	0	40	50.000.000	0,00	0	40	49.343.100	0	0	0	-	40,00	100,00%	49.343.100	98,69%	0	49.343.100	0	0	
		2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	2.1Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175	268.267.400	0	0	125	20.000.000	0,00	0	0	0	125	17.102.000	0	-	125,00	100,00%	17.102.000	85,51%	0	17.102.000	0	0	

		1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Kualitas Hidup Anak	190	200.000.000	0	0	175	10.000.000	0,00	0	0	0	175	8.100.000	0	-	175,00	100,00%	8.100.000	81,00%	0	8.100.000	0	0	
		2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah Petugas yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	30	18.267.400	0	0	175	10.000.000	0,00	0	0	0	175	9.002.000	0	-	175,00	100,00%	9.002.000	90,02%	0	9.002.000	0	0	
			1.3 Prosentase desa kelurahan layak anak	16,45	-	0	0	8,55		0,00	0	0	0	0	0	8,55	-	8,55	100,00%	-	0,00%	8,55	-	0	0	
			Prevalensi KB Aktif																							
		1. Program Pengendalian Penduduk	1.1 Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100	500.000.000	10	0	100	426.865.000	0,00	2.020.000	0	103.772.800	0	78.217.700	100	227.408.500	100,00%	411.419.000	96,38%	110	411.419.000	1100,00%	0	0	
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.1Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	230.000.000	0	0	100	170.000.000	0,00	2.020.000	0	0	0	0	100	160.684.700	100,00%	162.704.700	95,71%	0	162.704.700	0	0		

		1. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	1.1 Jumlah Petugas KKBPk dan Lintas Sektor yang melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	100	150.000.000	0	0	170	170.000.000	0,00	2.020.000	0	0	0	170	160.684.700	170,0	100,00%	162.704.700	95,71%	0	162.704.700	0	0	
		2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	2.1Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	116960	270.000.000	0	0	1169760	256.865.000	0,00	0	0	103.772.800	0	78.217.700	1169760	66.723.800	1169760,0	100,00%	248.714.300	96,83%	0	248.714.300	0	0
		1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPk di Sektor Lain	2.1 Jumlah Kampung KB yang Mempunyai Rumah Data Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	38	100.000.000	0	0	38	25.000.000	0,00	0	0	0	38	20.830.000	0	-	38,0	100,00%	20.830.000	83,32%	0	20.830.000	0	0
		2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK Non Fisik)	2.1 Jumlah blanco cetak data keluarga beresiko stunting	7093	35.465.000	0	0	7093	35.465.000	0,00	0	7093	35.114.000	0	0	0	-	7093,0	100,00%	35.114.000	99,01%	0	35.114.000	0	0
		3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.1 Jumlah Peserta KB Baru, KB Aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet Neet yang Dievaluasi	120	50.000.000	0	0	167	171.400.000	0,00	0	131	68.658.800	36	57.387.700	0	41.723.800	167,0	100,00%	167.770.300	97,88%	0	167.770.300	0	0

		4. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	2.1 Jumlah Pengelola Data yang Memahami Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	130	50.000.000	0	0	75	25.000.000	0,00	0	0	0	0	0	75	25.000.000	75,0	100,0 0%	25.000.000	100,0 0%	0	25.000.000	0	0	
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.2 Prosentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana	80,6	9.189.510.000	2	0	80,56	7.005.299.000	0,00	396.862.000	80	1.586.417.540	0	2.523.696.750	0,42	2.255.137.906	80,56	100,0 0%	6.762.114.196	96,53 %	82,56	6.762.114.196	4128,0 0%	0	
		1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.1Jumlah Kelompok Budaya Lokal yang Mensosialisasikan Program KKBPK Lewat Media Cetak/Elektronik	50	1.782.010.100	0	0	50	1.224.815.000	2,00	11.250.000	1	346.078.640	0	466.355.150	47	386.863.756	50,00	100,0 0%	1.210.547.546	98,84 %	0	1.210.547.546	0	0	
		1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.1 Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja yang Mendapat Advokasi tentang Program KKBPK	50	50.000.000	0	0	10	4.375.000	0,00	0	0	1.420.000	10	2.613.350	0	-	10,00	100,0 0%	4.033.350	92,19 %	0	4.033.350	0	0	
		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)	1.1 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	25.000.000	0	0	3	25.000.000	0,00	0	3	21.101.000	0	0	0	3.442.000	3,00	100,0 0%	24.543.000	98,17 %	0	24.543.000	0	0	

		3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1.1 Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang Melakukan Promosi KIE Program KKBPK	50	50.000.000	0	0	3	95.640.000	2,00	11.250.000	1	33.561.440	0	29.814.000	0	19.229.800	3,00	100,00%	93.855.240	98,13%	0	93.855.240	0	0
		4. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	1.1 Jumlah Media Massa Cetak Elektronik dan Media Lainnya yang Digunakan Promosi sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	50	50.000.000	0	0	2	25.000.000	0,00	0	2	14.437.000	0	9.000.000	0	1.500.000	2,00	100,00%	24.937.000	99,75%	0	24.937.000	0	0
		5. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1.1 Jumlah Masyarakat dan Lintas Sektor yang Mengetahui Harganas sehingga Program KKBPK bisa Diterima	200	100.000.000	0	0	1460	305.800.000	0,00	0	380	87.069.200	360	74.469.800	720	134.640.000	1460,00	100,00%	296.179.000	96,85%	0	296.179.000	0	0
		6. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK (DAK Non Fisik)	1.1 Jumlah Kader di balai penyuluh KKBPK yang mendapatkan biaya operasional	4140	729.000.000	0	0	4140	729.000.000	0,00	0	1080	188.010.000	3150	342.748.000	0	198.241.956	4230,00	102,17%	728.999.956	100,00%	0	728.999.956	0	0

		7. Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	1.1 Jumlah Tim audit stunting yang melaksanakan audit tentang kasus stunting	160	40.000.000	0	0	160	40.000.000	0,00	0	0	480.000	30	7.710.000	130	29.810.000	160,00	100,00%	38.000.000	95,00%	0	38.000.000	0	0
		2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	2.1Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60	2.896.700.000	0	0	62	2.806.200.000	60,00	323.618.000	0	666.778.000	0	1.098.146.000	2	714.378.150	62,00	100,00%	2.802.920.150	99,88%	0	2.802.920.150	0	0
		1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	2.1 Jumlah IPM yang dibina program KKBPK	1.828	1.337.500.000	0	0	21936	1.197.000.000	5484,00	300.191.000	5484	298.910.000	5484	298.910.000	5484	298.910.000	21936,00	100,00%	1.196.921.000	99,99%	0	1.196.921.000	0	0
		2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	2.1 Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB	3	50.000.000	0	0	2	100.000.000	0,00	1.910.000	0	3.068.000	2	52.028.000	0	40.820.150	2,00	100,00%	97.826.150	97,83%	0	97.826.150	0	0
		3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	2.1 Jumlah Penyuluh PKB / PLKB yang Mendapat Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	62	50.000.000	0	0	62	50.000.000	62,00	21.517.000	0	0	0	17.608.000	0	9.848.000	62,00	100,00%	48.973.000	97,95%	0	48.973.000	0	0

		4. Penggerak an Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK Non Fisik)	2.1 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerak an Kader Institusi Masyaraka t Pedesaan (IMP)	2.315	1.459.200.000	0	0	3648	1.459.200.000	0,00	0	91 2	364.800.00 0	1824	729.600.000	912	364.800.00 0	3648, 00	100,0 0%	1.459.200. 000	100,0 0%	0	1.459.200.000	0	0
		3. Pengendali an dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontraseps i serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	3.1Jumlah pengendali an dan pendistribusi an kebutuhan alat dan obat kontraseps i yang terdistribusi sikan serta pelaksanaa n pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.92 9	3.398.128.000	0	0	2692 9	2.283.784.000	0,00	61.994.00 0	25 05 8	571.495.90 0	0	610.702.100	1871	822.693.00 0	26929 ,00	100,0 0%	2.066.885. 000	90,50 %	0	2.066.885.000	0	0
		1. Pengendali an Pendistribusi an Alat dan Obat Kontraseps i dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya (DAK NON FISIK BOKB)	3.1 Jumlah Faskes yang mendaapat distribusi kebutuhan alat dan obat kontraseps i serta pelaksanaa n pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	42	75.726.000	0	0	42	43.900.000	0,00	0	42	8.609.500	0	9.524.500	0	22.430.000	42,00	100,0 0%	40.564.00 0	92,40 %	0	40.564.000	0	0
		2. Peningkata n Kesertaan Pengguna n Metode Kontraseps i jangka Panjang (MKJP) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	3.1 Jumlah pengguna MKJP yang meningkat lewat promosi program Bangga Kencana (Pembang unan Keluarga Kependud ukan dan Keluarga	108	250.000.000	0	0	2229	1.038.439.000	108,0 0	54.000.00 0	11 49	548.634.40 0	972	351.419.000	0	43.968.500	2229, 00	100,0 0%	998.021.9 00	96,11 %	0	998.021.900	0	0

			Berencana) (APBD)																						
		3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3.1 Jumlah petugas faskes dan petugas KB yang memahami kebutuhan alkon	108	50.000.000	0	0	36	10.000.000	0,00	0	0	0	0	0	36	9.418.700	36,00	100,00%	9.418.700	94,19%	0	9.418.700	0	0
		4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3.1 Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional PLKB/PKB (DAK FISIK)	3	999.280.000	0	0	12	1.165.845.000	0,00	0	0	0	0	248.958.600	12	746.875.800	12,00	100,00%	995.834.400	85,42%	0	995.834.400	0	0
		5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.1 Jumlah Akseptor yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	126	50.000.000	0	0	42	15.600.000	0,00	0	42	13.242.000	0	800.000	0	-	42,00	100,00%	14.042.000	90,01%	0	14.042.000	0	0
		6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3.1 Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat sosialisasi	150	50.000.000	0	0	36	10.000.000	36,00	7.994.000	0	1.010.000	0	0	0	-	36,00	100,00%	9.004.000	90,04%	0	9.004.000	0	0

		4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.1Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828	1.112.672.000	0	0	1828	690.500.000	0,00	0	0	2.065.000	1828	348.493.500	0	331.203.000	1828,00	100,00%	681.761.500	98,73%	0	681.761.500	0	0	
		1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.1 Jumlah Kerja Sama Lintas Sektor tentang Program KKBPK di Kampung KB	180	100.000.000	0	0	20	10.000.000	0,00	0	0	0	10	3.471.500	10	2.300.000	20,00	100,00%	5.771.500	57,72%	0	5.771.500	0	0	
		2. Pelaksanaan dan Pengelolaa n Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	4.1 Jumlah Kader yang mendapat biaya operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3800	912.672.000	0	0	3800	680.500.000	0,00	0	0	2.065.000	2660	345.022.000	1140	328.903.000	3800,00	100,00%	675.990.000	99,34%	0	675.990.000	0	0	
			Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																							
		1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.1 Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	98,02	2.907.400.000	99,75	0	97,81	5.585.520.000	0,00	28.259.100	0	196.228.800	73	226.414.000	24,52	2.965.344.000	97,81	100,00%	3.416.245.900	61,16%	197,56	3.416.245.900	197,9%	0	

		1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.1Jumlah Kader Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1.066	2.707.400.000	0	0	1066	5.247.520.000	0,00	28.259.100	1066	186.366.100	0	216.507.500	0	2.656.090.000	1066,00	100,00%	3.087.222.700	58,83%	0	3.087.222.700	0	0	
		1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1.1 Jumlah Kader Kelompok BKB yang dibina	100	200.000.000	0	0	70	20.000.000	70,00	19.896.700	0	0	0	0	0	-	70,00	100,00%	19.896.700	99,48%	0	19.896.700	0	0	

		2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK FISIK PENUGASAN)	1.1 Jumlah sarana penugasan DAK Fisik yang terpenuhi (Pengadaan Kit Siap Nikah dan BKB Kit Stunting)	2	280.000.000	0	0	1	150.000.000	0,00	0	1	125.160.000	0	0	0	-	1,00	100,00%	125.160.000	83,44%	0	125.160.000	0	0
		3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1.1 Jumlah Pengelola Kelompok BKB, BKR, BKL yang Dilatih	100	100.000.000	0	0	36	10.000.000	36,00	8.362.400	0	1.010.000	0	0	0	-	36,00	100,00%	9.372.400	93,72%	0	9.372.400	0	0
		4. Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1.1 Jumlah Remaja yang Mendapat Advokasi	100	100.000.000	0	0	20	10.000.000	0,00	0	0	0	20	9.867.500	0	-	20,00	100,00%	9.867.500	98,68%	0	9.867.500	0	0

		5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1.1 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	50	820.000.000	0	0	2586	5.032.520.000	0,00	0	358	59.520.000	2228	182.380.000	0	2.656.090.000	2586,00	100,00%	2.897.990.000	57,59%	0	2.897.990.000	0	0
		6. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	1.1 Jumlah Pengelola Kelompok UPPKS yang Terpenuhi	18	100.000.000	0	0	18	25.000.000	0,00	0	0	676.100	18	24.260.000	0	-	18,00	100,00%	24.936.100	99,74%	0	24.936.100	0	0
		2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.1 Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50	200.000.000	0	0	1180	338.000.000	0,00	0	35	9.862.700	25	9.906.500	1120	309.254.000	1180,00	100,00%	329.023.200	97,34%	0	329.023.200	0	0

Rata - rata capaian kinerja (%) :		1. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	2.1 Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	100.000.000	0	0	1155	328.000.000	0,00	0	35	9.862.700	0	0	1120	309.254.000	1155,00	100,00%	319.116.700	97,29%	0	319.116.700	0	0
		2. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2.1 Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	100.000.000	0	0	25	10.000.000	0,00	0	0	0	25	9.906.500	0	-	25,00	100,00%	9.906.500	99,07%	0	9.906.500	0	0
									20.030.700.356										91,26%	16.996.540.241	79,66%				

Predikat kinerja :

Sangat Tinggi
Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja (Renstra DP2KBP2 2016-2021)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2021 – 2026 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	APE Madya	100 %
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	50 %
	Prevalensi KB Aktif	80,56 %	80,73 %	100 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,96 %	71,11%	97,46 %
	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	100 %	100 %
	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,56 %	80,73 %	100 %
	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,81 %	95,49 %	97,63 %
	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	80,36 %	66,67 %	82,96 %
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	38,89 %	100 %	100 %
	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	91,67 %	100 %	100 %
	Persentase Kecamatan Layak Anak	33,33 %	100 %	100 %
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	8,55 %	72,37 %	100 %

	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	40,74 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	90 %	80 %	100 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85 %	84,67 %	99,61 %
	Indeks Profesionalitas ASN	65,39	58,44	64,43 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,78 (A)	83,87 (A)	100 %
	Nilai RB Perangkat Daerah	51	82.62 (A)	100 %
3. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi	1 Inovasi	50 %

Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran pada Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah senagai berikut :

SASARAN KINERJA 1

Sasaran Kinerja yang pertama Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dengan empat belas indikator yaitu

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Presentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan
6. Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana
7. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender
9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan
10. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan

Pelaksanaan PUG di Desa

11. Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
12. Persentase Kecamatan Layak Anak
13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
14. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan

Dari Empat Belas indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

SASARAN KINERJA 1

Sasaran Kinerja yang pertama Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dengan empat belas indikator yaitu

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Presentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan
6. Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana
7. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender
9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan
10. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa
11. Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
12. Persentase Kecamatan Layak Anak
13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
14. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan

Dari Empat Belas indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)

(Predikat Pratama, Madya, Utama, Mentor)

Target APE Madya dengan realisasi nilai APE Madya yang di dapat dari 7 komponen kunci yaitu :

1. Komitmen, di buktikan dengan SK Fokal Point, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Daerah.

2. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
3. Kelembagaan, adanya Unit PPPA Daerah (Tahun 2022 masih proses pembentukan), Kelompok Pokja PUG, Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran, jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih PPRG, Anggaran dan Fasilitas yang memadai.
5. Alat Analisis Gender, Forum data tiap Perangkat Daerah (Satu Data Palapa), Data Statistik yang terpilah, Profil gender.
6. Data Gender, dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1.
7. Partisipasi Masyarakat, Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di dapat dari 4 program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender di dukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- c. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan di dukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan di dukung oleh 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender

dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

FOTO PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)



2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

(Predikat Pratama, Madya, Nindya, KLA)

Target KLA Nindya dengan realisasi KLA Madya berdasarkan 5 Klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pengaduan (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredainya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di dapat dari 2 program, 5 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Prosentase Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dukung dengan 2 kegiatan, 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dukung dengan 3 kegiatan, 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

SALAH SATU INDIKATOR KLA

INDIKATOR/SUBINDIKATOR		DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
5	Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada kluster KLA?	beberapa data yang harus didapat dari instansi vertikal atau LSM misalnya : Data Perkawinan anak; Data anak berkonflik dengan hukum yang sudah inkra dan di lembaga pembinaan anak; Data buruh anak	DP2KBP2	
7	Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah?	Pastikan ada lampiran foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih. Jika ada situs (website) atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA; DISKOMINFO; DP2KBP2; BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
8	Berapa kali publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir?	Pertanyaan ini terkait dengan Pertanyaan No. 7. Pastikan jawaban Media KIE yang dipilih sesuai dengan jawaban Media KIE di Pertanyaan No.7. Pastikan ada lampiran foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih. Jika ada website atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA; DISKOMINFO; DP2KBP2; BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
5	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak an	Lengkapi matriks dan lampirkan bukti adanya mekanisme pengawasan yang diupayakan oleh penanggungjawab indikator dan mitra kerja. (5.5)	DISKOMINFO; DISPERKA; DP2KBP2	
6	Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?	Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat SDM atau dokumen yang menjelaskan bahwa SDM sedang mengikuti proses sertifikasi ramah anak. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang (5.6)	DISKOMINFO; DISPERKA; DP2KBP2	
9	Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?	Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.	DP2KBP2	
1	Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak	Lampirkan daftar FA Kecamatan, dan SK pembentukan FA tiap kecamatan secara lengkap	DP2KBP2; Forum Anak Kabupaten/Kota/Kecamatan; Kecamatan	
2	Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak	Lampirkan daftar FA Desa/Kelurahan, dan SK pembentukan FA tiap desa/kelurahan secara lengkap	DP2KBP2; Forum Anak Kabupaten/Kota/Kecamatan; Desa/Kelurahan	
3	Apakah Forum Anak kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung : undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung	BAPPEDA; DP2KBP2	
4	Apakah Forum Anak kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan	DP2KBP2	
5	Apakah Forum Anak kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak	Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data Forum Anak yang terdaftar, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga	DP2KBP2	

DINSOS
 DPUPR
 DLH
 BAKESBANGPOL
 BAGIAN PROTOKOL
 BPBD
 DISKOMINFO
 DP2KBP2
 Nilai KLA
 Sheet1
 CATATAN
 +

FOTO PENGHARGAAN KLA MADYA



3. Prevalensi KB Aktif :

Target 80,56% dengan realisasi 80,73 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah Peserta Aktif (PA)

X 100 %

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{197.656}{245.061} \times 100 \% = 80,56 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{183.388}{227.174} \times 100 \% = 80,73 \%$$

Pencapaia peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 183.388 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Jetis dengan jumlah 14.173 akseptor atau 143,02 % dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas dengan jumlah 4.491 akseptor atau 128,87 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 55.766 akseptor dan PA-Pria/MOP sejumlah 364 Akseptor.

Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi Tahun 2022 sebesar 80,73 % dari PUS sejumlah 227.174. Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Mojosari yaitu 87,08 % dan yang terendah Kecamatan Mojoanyar sebesar 77,74 %.

Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 92.613 akseptor dan terendah MOP yaitu 364 akseptor.

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2022
1	IUD	22.056
2	MOW	12.373
3	MOP	364
4	Kondom	5.490
5	Implant	20.973
6	Suntik	92.613
7	Pil	29.519
	TOTAL	183.388

Sumber data : Bidang Dalduk

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 s/d 2022

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2016	235.658	192.406	81,65
2.	2017	229.263	184.224	80,35
3.	2018	235.221	189.398	80,52
4.	2019	240.593	194.562	80,87
5.	2020	245.061	197.565	80,62
6.	2021	247.373	199.545	80,67
7.	2022	227.174	183.388	80,73

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Rutin)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Perolehan dari indikator sasaran Prevalensi KB Aktif di dapat dari 2 program, 6 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Prosentase Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan, di dukung dengan 2 kegiatan, 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di

dukung dengan 4 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.
 - b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - c. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan.
 - d. Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK.
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)'
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penhyuluhan KKBPK.
 - g. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya.
 - f. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB di dukung sengan 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

Data Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2022

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF															
DI KABUPATEN MOJOKERTO															
BULAN DESEMBER 2022															
NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2022		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.544	7.298	724	601	1	130	625	3.251	729	6.061	133,38	1.951	32,19	83,05
2	GONDANG	4.504	9.973	1.619	704	30	20	1.734	2.972	953	8.032	178,33	4.087	50,88	80,54
3	PACET	7.476	13.101	1.975	662	13	31	2.076	4.538	1.301	10.596	141,73	4.726	44,60	80,88
4	TRAWAS	3.485	5.682	395	387	3	32	559	2.552	563	4.491	128,87	1.344	29,93	79,04
5	NGORO	9.951	17.089	1.424	1.058	11	353	1.277	6.687	2.857	13.667	137,34	3.770	27,58	79,98
6	PUNGGING	9.291	14.425	1.045	387	11	164	770	7.774	1.223	11.374	122,42	2.213	19,46	78,85
7	KUTOREJO	8.369	11.548	503	357	7	86	805	5.265	2.364	9.387	112,16	1.672	17,81	81,29
8	MOJOSARI	8.974	15.808	3.179	1.144	15	762	1.765	4.787	2.114	13.766	153,40	6.103	44,33	87,08
9	DLANGGU	6.125	12.241	1.444	1.058	63	59	1.335	4.759	1.058	9.776	159,61	3.900	39,89	79,86
10	BANGSAL	5.822	9.620	570	447	11	419	541	4.706	1.094	7.788	133,77	1.569	20,15	80,96
11	PURI	8.526	16.256	1.396	838	21	779	1.974	5.196	2.970	13.174	154,52	4.229	32,10	81,04
12	TROWULAN	8.308	15.627	872	732	10	268	1.454	6.465	2.690	12.491	150,35	3.068	24,56	79,93
13	SOOKO	6.889	15.129	1.967	875	6	470	833	6.364	1.518	12.033	174,67	3.681	30,59	79,54
14	GEDEG	4.934	16.414	1.871	899	22	594	1.686	5.634	2.375	13.081	265,12	4.478	34,23	79,69
15	KEMLAGI	5.982	11.704	1.071	802	58	571	1.408	4.413	1.362	9.685	161,90	3.339	34,48	82,75
16	JETIS	9.910	18.044	854	575	60	526	808	9.117	2.233	14.173	143,02	2.297	16,21	78,55
17	DAWARBLANDONG	6.259	8.634	340	381	12	109	606	4.651	1.043	7.142	114,11	1.339	18,75	82,72
18	MOJODANYAR	5.056	8.581	807	466	10	117	717	3.482	1.072	6.671	131,94	2.000	29,98	77,74
	KABUPATEN	124.405	227.174	22.056	12.373	364	5.490	20.973	92.613	29.519	183.388	147,41	55.766	30,41	80,73

4. Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Target 72,96% terealisasi 71.11%

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Sasaran Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

X 100 %

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun 2022
$\frac{100.850}{138.234} \times 100 \% = 72,96$	$\frac{87.714}{123.352} \times 100 \% = 77,11 \%$

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten mojokerto Sebesar 87.714 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Juamlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	40.579	52.415
2.	BKR	27.215	40.725
3.	BKL	18.159	27.574
4.	PIK - R	180	180
5.	UPPKA	1.581	2.458
JUMLAH		87.714	123.352

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Dallap)

Perolehan dari indikator sasaran Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dukung dengan 8 Kegiatan, 8 sub kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan

- Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- f. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mintra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Organisasi Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Data Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK/R Se Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	REKAP JUMLAH SASARAN	PROSENTASE KESERTAAN KELOMPOK KEGIATAN
	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Kelompok BKL	Kelompok UPPKS	PIK /RM	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Kelompok BKL	Kelompok UPPKS	PIK /RM			
1 JATIREJO	3535	2304	1001	49		4040	3124	2422	96		6889	9682	71,15
2 GONDANG	370	290	270	30		390	310	280	40		960	1020	94,12
3 PACET	3167	1998	1292	128		3400	2179	1309	191		6585	7079	93,02
4 TRAWAS	1825	2075	1644	0		1705	1951	1866	45		5544	5567	99,59
5 NGORO	4025	2768	1244	56		5255	4026	1882	156		8093	11319	71,50
6 PUNGGING	1060	429	1151	17		1280	1126	2005	50		2657	4461	59,56
7 KUTUREJO	3695	1517	1066	276		3726	1522	1083	276		6554	6607	99,20
8 MOJOSARI	2855	1218	1333	85		3545	1332	1422	135		5491	6434	85,34
9 DLANGGU	1706	1759	1265	12		3493	4471	1753	55		4742	9772	48,53
10 BANGSAL	3636	2412	1132	29		3700	2420	1254	3		7209	7377	97,72
11 PURI	3242	2413	1106	35		3242	2413	1106	169		6796	6930	98,07
12 TROWULAN	1365	825	766	20		3739	3308	2250	45		2976	9342	31,86
13 SOOKO	558	275	425	7		3047	674	967	15		1265	4703	26,90
14 GEDEG	3178	2400	1145	18		3339	2636	1615	96		6741	7686	87,70
15 KEMLAGI	2692	2812	1274	81		2692	2812	1274	211		6859	6989	98,14
16 JETIS	734	387	488	492		1156	1057	1276	562		2101	4051	51,86
17 DAWAR BLD	1542	949	759	231		3272	4740	3013	265		3481	11290	30,83
18 MOJOANYAR	1394	384	798	15		1394	624	797	48		2591	2863	90,50
JUMLAH	3905	27215	18159	1581	180	52415	40725	27574	2458	180	51040	123352	121977
TOTAL	51040					123352							

5. Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di
Kaporkan

Target 100% terealisasi 100%

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah Data yang ada

X 100 %

Jumlah Data yang dilaporkan

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun 2022
$\frac{10 \text{ Laporan}}{10 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{10 \text{ Laporan}}{10 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100 \%$

Data di peroleh dari lapangan PKB/PLKB yang terdiri dari data :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Pencapaian peserta KB baru
 - a. Pencapaian Peserta KB baru semua Metode.
 - b. Peserta KB Aktif (PA)
 - a. Pencapaian Peserta KB Aktif
 - b. Pencapaian Peserta KB aktif jalur pelayanan Pemerintah
 - c. Pencapaian Peseta KB aktif jalur pelayanan Swasta
 - c. Sisa PUS (PUS Tidak ber KB)
 - d. PUP (Usia Kawin Pertama Wanita)
 - a. PUP (Usia Kawin Pertama Wanita)
 - e. Droup Out
 - f. Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK - R
- Semua data Pelayanan KB di input melalui aplikasi Rutin BKKBN dan SIGA (Sistim Informasi Keluarga)

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

- a. Program Pemberdayaan Perempuan terdiri dari
 - KDRT
 - Pencabulan
 - Penganiayaan
 - Pemerkosaan
 - Penelantaran
 - Pornografi
 - Hak asuh anak
 - Pelecehan seksual
 - Bullying
 - Lain – lain

Perolehan dari indikator program Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Aktif di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Prosentase Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan, di dukung dengan 2 kegiatan, 5 sub kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.

c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.

d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.

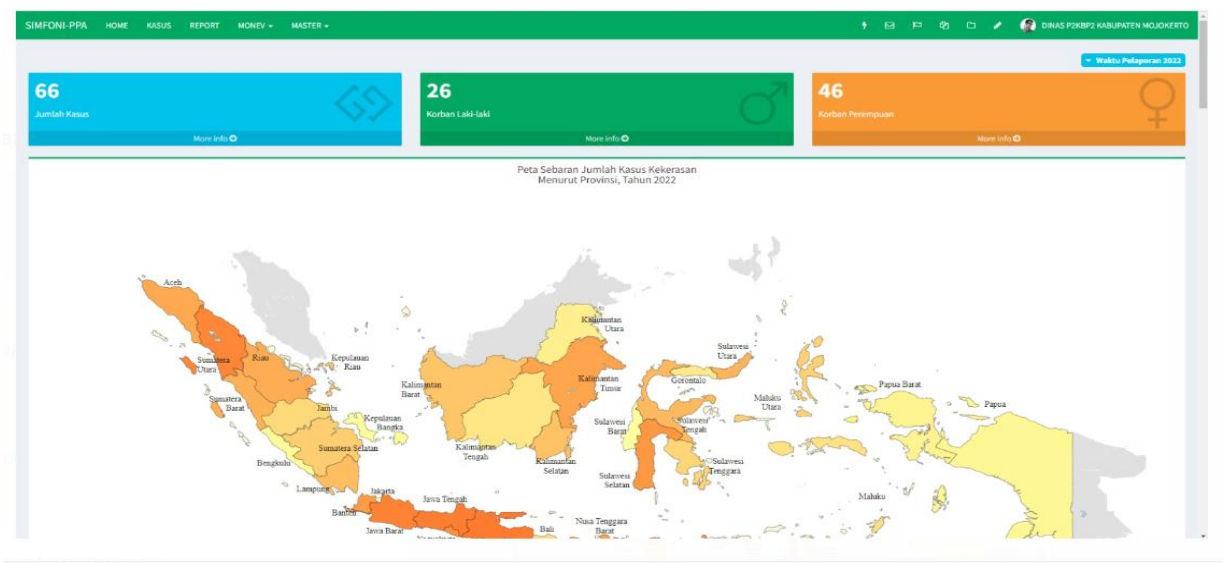
Aplikasi Laporan berdasarkan urusan :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Laporan Sistim Informasi Keluarga (SIGA)

bkkbn siga	
Beranda	
YAN KB / PELKON	Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Kumulatif
Kartu Pendaftaran	Nama Laporan
Tempat Pelayanan KB	TABEL 20 - JUMLAH PEMBERIAN INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB ULANGAN
Register	TABEL 21 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
DALLAP	TABEL 21A - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH FASKES PEMERINTAH
Kartu Pendaftaran	TABEL 21B - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH FASKES SWASTA
Register	TABEL 21C - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT
LAPORAN	TABEL 21D - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES)
YAN KB	TABEL 21E - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH JARINGAN
DALLAP	TABEL 21F - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH PRAKTIK MANDIRI BIDAN JEJARING
REKAPITULASI	TABEL 22 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
Rekapitulasi Data Keluarga	TABEL 23 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA KEGUGURAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
	TABEL 24 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN PENGGUNAAN ASURANSI KESEHATAN
	TABEL 25 - JUMLAH KASUS KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
	TABEL 26 - JUMLAH PENCABUTAN IMPLAN DAN IUD BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN KB
	TABEL 27 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
	TABEL 27A - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH FASKES PEMERINTAH
	TABEL 27B - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH FASKES SWASTA
	TABEL 27C - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 Aplikasi Simfoni PPA



Report Kasus Tahun 2022

REPORT BENTUK KEKERASAN, TEMPAT KEJADIAN & PELAYANAN
MOJOKERTO JAWA TIMUR
BASIS DATA TANGGAL PELAPORAN
SEMESTER 1 S/D SEMESTER 2
TAHUN 2022

No	Unit / Instansi	Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Klat	Pengadilan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	Mojokerto	45	3	12	14	1	3	4	9	13	1	19	7	5	0	30	14	4	0	1	0	1	1

Export to xlsx

Export to xls

6. Prosentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana
 Target 80,56% terealisasi 80,73%

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah Peserta KB Aktif (PA)

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

X 100 %

Perhitungan Target Tahun 2022

197.656

245.061

X 100 % = 80,56 %

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

183.388

227.174

X 100% = 80,73

Rencana Kerja Tahun 2024 - DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

80

Capaian Prosentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana di dapat dari Peserta KB Aktf (PA) dengan jumlah 183.388 akseptor dan jumlah PUS di 227.174 akseptor .

NO.	Jenis Kontrasepsi	Jumlah
1.	IUD	22.056
2.	MOW	12.373
3.	MOP	364
4.	KONDOM	5.490
5.	IMPLAN	20.973
6.	SUNTIK	92.613
7.	PIL	29.519
Jumlah Peserta Aktif (PA)		183.388
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)		227.174
Prevalensi		80,73 %

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Rutin)

Perolehan dari indikator program Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dapat dari 1 program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dukung dengan 4 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.
 - b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - c. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan.
 - d. Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK.
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok).
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penhyuluhan KKBPK.

- g. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya.
 - f. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB di dukung sengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

Data Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2022

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF															
DI KABUPATEN MOJOKERTO															
BULAN DESEMBER 2022															
NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2022		IUD	MDW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.544	7.298	724	601	1	130	625	3.251	729	6.061	133,38	1.951	32,19	83,05
2	GONDANG	4.504	9.973	1.619	704	30	20	1.734	2.972	953	8.032	178,33	4.087	50,88	80,54
3	PACET	7.476	13.101	1.975	662	13	31	2.076	4.538	1.301	10.596	141,73	4.726	44,60	80,88
4	TRAWAS	3.485	5.682	395	387	3	32	559	2.552	563	4.491	128,87	1.344	29,93	79,04
5	NGORO	9.951	17.089	1.424	1.058	11	353	1.277	6.687	2.857	13.667	137,34	3.770	27,58	79,98
6	PUNGGING	9.291	14.425	1.045	387	11	164	770	7.774	1.223	11.374	122,42	2.213	19,46	78,85
7	KUTOREJO	8.369	11.548	503	357	7	86	805	5.265	2.364	9.387	112,16	1.672	17,81	81,29
8	MOJOSARI	8.974	15.808	3.179	1.144	15	762	1.765	4.787	2.114	13.766	153,40	6.103	44,33	87,08
9	DLANGGU	6.125	12.241	1.444	1.058	63	59	1.335	4.759	1.058	9.776	159,61	3.900	39,89	79,86
10	BANGSAL	5.822	9.620	570	447	11	419	541	4.706	1.094	7.788	133,77	1.569	20,15	80,96
11	PURI	8.526	16.256	1.396	838	21	779	1.974	5.196	2.970	13.174	154,52	4.229	32,10	81,04
12	TROWULAN	8.308	15.627	872	732	10	268	1.454	6.465	2.690	12.491	150,35	3.068	24,56	79,93
13	SOOKO	6.889	15.129	1.967	875	6	470	833	6.364	1.518	12.033	174,67	3.681	30,59	79,54
14	GEDEG	4.934	16.414	1.871	899	22	594	1.686	5.634	2.375	13.081	265,12	4.478	34,23	79,69
15	KEMPLAGI	5.982	11.704	1.071	802	58	571	1.408	4.413	1.362	9.685	161,90	3.339	34,48	82,75
16	JETIS	9.910	18.044	854	575	60	526	808	9.117	2.233	14.173	143,02	2.297	16,21	78,55
17	DAWARBLANDONG	6.259	8.634	340	381	12	109	606	4.651	1.043	7.142	114,11	1.339	18,75	82,72
18	MOJODANYAR	5.056	8.581	807	466	10	117	717	3.482	1.072	6.671	131,94	2.000	29,98	77,74
	KABUPATEN	124.405	227.174	22.056	12.373	364	5.490	20.973	92.613	29.519	183.388	147,41	55.766	30,41	80,73

7. Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif

Target 97,81% terealisasi 95,49 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
$\frac{\text{Jumlah kelompok Tribina, PIK R, UPPKS yang aktif}}{\text{Jumlah kelompok yang ada}} \times 100 \%$	

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{1.829}{1.870} \times 100 \% = 97,81 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{1.271}{1.331} \times 100 \% = 95,49$$

Jumlah Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten Mojokerto Sebesar 1.331 Kelompok, dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Juamlah kelompok yang aktif	Jumlah kelompok yang ada
1.	BKB	429	462
2.	BKR	267	272
3.	BKL	352	368
4.	PIK - R	92	93
5.	UPPKA	131	136
JUMLAH		1.271	1.331

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Dallap)

Perolehan dari indikator program Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dukung dengan 8 Kegiatan, 8 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - c. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- f. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mintra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Organisasi Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Data Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK YANG AKTIF					JUMLAH KELOMPOK					REKAP JUMLAH KELOMPOK YANG AKTIF	REKAP JUMLAH KELOMPOK
	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Kelompok BKL	Kelompok UPPKS	PIK/RM	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Kelompok BKL	Kelompok UPPKS	PIK/RM		
1 JATIREJO	38	12	26	4	4	38	12	26	4	4	84	84
2 GONDANG	18	18	18	0	5	18	18	18	0	5	59	59
3 PACET	20	20	20	2	4	20	20	20	2	4	66	66
4 TRAWAS	21	14	21	2	3	21	14	21	4	3	61	63
5 NGORO	20	19	19	3	5	20	19	19	3	5	66	66
6 PUNGGING	19	10	19	4	3	19	10	19	4	3	55	55
7 KUTOREJO	28	10	24	7	4	28	10	24	7	4	73	73
8 MOJOSARI	19	19	19	19	4	19	19	19	19	4	80	80
9 DLANGGU	29	17	27	3	3	29	17	27	3	3	79	79
10 BANGSAL	19	7	14	3	4	19	7	14	3	4	47	47
11 PURI	26	17	23	16	6	26	17	23	16	6	88	88
12 TROWULAN	17	16	17	3	6	30	16	17	3	6	59	72
13 SOCKO	18	10	15	5	6	18	10	15	5	6	54	54
14 GEDEG	14	10	10	4	6	25	15	20	7	6	44	73
15 KENLAGI	38	20	20	20	7	38	20	20	20	7	105	105
16 JETIS	16	16	16	5	3	25	16	22	5	4	56	72
17 DAWARBLD	45	21	25	25	12	45	21	25	25	12	128	128
18 MOJODANAR	24	11	19	6	7	24	11	19	6	7	67	67
JUMLAH	429	267	352	131	92	462	272	368	136	93	1271	1331
TOTAL	1271					1331						

8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender

Target 80,36% terealisasi 66,67 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah PD yang Melaksanakan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah Perangkat Daerah

X 100 %

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{45 \text{ PD}}{56 \text{ PD}} \times 100 \% = 80,36$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{38 \text{ PD}}{57 \text{ PD}} \times 100 \% = 66,67$$

Dari 57 PD di Kabupaten Mojokerto ada yang melaksanakan kegijakan PPRG (GAP, GBS, TOR) hanya 38 PD dengan total anggaran Rp. 65.825.434.987,00 dan 20 PD yang melum melaksanakan kebijakan PPRG yaitu :

Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

NO.	PD yang Sudah Melaksanakan Kebijakan PPRG	Anggaran (Rp.)
1.	Sekretaris DPR	75.000.000,00
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.400.305.000,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	1.338.220.250,00
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	588.849.000,00
5.	Inspektorat	311.720.000,00
6.	Dinas Pertanian	560.000.000,00
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.069.250.000,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	996.441.200,00
10.	Dinas Komunikasi dan informatika	200.000.000,00
11.	DP2KBP2	2.965.458.000,00
12.	DPMD	1.307.500.000,00
13.	DISPENDUK CAPIL	383.000.000,00
14.	DLH	630.000.000,00
15.	Dinas Pangan dan Perikanan	440.000.000,00
16.	Dinas Tenaga Kerja	200.600.000,00
17.	Dinas Sosial	406.000.000,00
18.	DPRKP2	350.000.000,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.295.559.000,00
20.	Dinas Kesehatan	4.208.281.841,00
21.	Dinas Pendidikan	100.000.000,00
22.	RSUD Prof Dr. Soekandar	7.000.000.000,00
23.	RSUD R.A Basuni	34.239.244.996,00
24.	Bagian Umum Setda	630.000.000,00
25.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	364.217.000,00
26.	Bagian Administrasi Pembangunan	620.000.000,00
27.	Bagian Administrasi Perekonomian	230.000.000,00
28.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	1.600.000.000,00
29.	Bagian Administrasi Pemerintahan	450.000.000,00
30.	Bagian Organisasi Setda	221.000.000,00
31.	Bagian Layanan Pengadaan Barang	585.000.000,00
32.	Kecamatan Trawas	256.100.000,00
33.	Kecamatan Pungging	255.400.000,00
34.	Kecamatan Puri	332.579.900,00
35.	Kecamatan Sooko	49.710.000,00
36.	Kecamatan Gedeg	105.000.000,00
37.	Kecamatan Kemlagi	19.998.800,00
38.	DPMPTSP	553.394.000,00
Jumlah total		66.378.828.987,00

Sumber Data : Bidang PPPUG

Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PPRG

NO.	PD yang Belum Melaksanakan Kebijakan PPRG	Anggaran (Rp.)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	-
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
6.	Bagian Hukum Setda	-
7.	Badan Administrasi Kesejahteraan	-
8.	Kecamatan Jatirejo	-
9.	Kecamatan Gondang	-
10.	Kecamatan Pacet	-
11.	Kecamatan Ngoro	-
12.	Kecamatan Kutorejo	-
13.	Kecamatan Mojosari	-
14.	Kecamatan Dlanggu	-
15.	Kecamatan Bangsal	-
16.	Kecamatan Trowulan	-
17.	Kecamatan Mojoanyar	-
18.	Kecamatan Jetis	-
19.	Kecamatan Dawarblandong	-

Sumber Data : Bidang PPPUG

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender di dapat dari 1 program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender di dukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan.

Target 100% terealisasi 100 %
Ada 18 korban perempuan yang melapor ke P2TP2A telah di nyatakan selesai

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan yang melapor ke P2TP2A}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{19 \text{ Korban}}{19 \text{ Korban}} \times 100 \% = 100 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{18 \text{ Korban}}{18 \text{ Korban}} \times 100 \% = 100 \%$$

Dapat dilihat dari data sebagai berikut :

KECAMATAN	Perempuan		
	Jumlah	Jenis kasus	Kategori Tempat
Kemlagi	-	-	-
Gedeg	1	Psikis	TKP
Jetis	3	Fisik, Psikis/KBGO, Kekerasan lainnya (dituduh mencuri)	TKP, TKP,TKP
Dawarblandong	-	-	-
Pacet	-	-	-
Jatirejo	1	Psikis	TKP
Gondang	-	-	-
Trawas	-	-	-
Puri	1	Psikis	TKP
Sooko	2	Psikis, Perkosaan	TKP, Rumah Korban
Trowulan	1	Psikis	TKP
Bangsar	-	-	-
Mojoanyar	-	-	-
Pungging	1	Fisik	TKP
Ngoro	3	Psikis, Psikis, Fisik	TKP, TKP, TKP
Kutorejo	1	Pornografi	TKP
Dlanggu	2	Psikis, Penelantaran	TKP, TKP
Mojosari	2	Pelecehan Seksual, Psikis	TKP, TKP
TOTAL	18		

Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Mojokerto

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan layanan Bantuan di dapat dari 1 program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan di dukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa

Target 38,89% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Desa/Kelurahan yang mendapat Pelatihan}}{\text{Jumlah Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun 2022
$\frac{100 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 38,89$	$\frac{304 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 100$

DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto telah melatih 299 Desa 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto agar paham tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mengadakan Sosialisasi dan Bimtek tentang Desa ramah perempuan dan peduli anak.

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dapat dari 1 program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung

dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

11.Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak

Target 91,67% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	X 100 %
Jumlah OPD di Kabupaten Mojokerto	

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun
$\frac{44 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100 \% = 91.67$	$\frac{2022}{48 \text{ OPD}} \times 100 \% = 100$

Kabupaten Mojokerto mempunyai 48 Perangkat Daerah, dan semua Perangkat Daerah telah memiliki data terpilah gender yang tertuang dalam dokumen renstra masing – masing Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Data Terpilah Gender dan Anak

NO.	PD yang Sudah Melaksanakan Data Terpilah Gender dan Anak
1.	Sekretaris DPRD
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Pendapatan Daerah
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Inspektorat
6.	Dinas Pertanian
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10.	Dinas Komunikasi dan informatika
11.	DP2KBP2
12.	DPMD
13.	DISPENDUK CAPIL
14.	DLH
15.	Dinas Pangan dan Perikanan
16.	Dinas Tenaga Kerja
17.	Dinas Sosial
18.	DPRKP2
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	Dinas Kesehatan
21.	Dinas Pendidikan
22.	RSUD Prof Dr. Soekandar
23.	RSUD R.A Basuni
24.	Bagian Umum Setda
25.	Bagian Administrasi Pembangunan

26.	Bagian Administrasi Perekonomian
27.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
28.	Bagian Administrasi Pemerintahan
29.	Bagian Organisasi Setda
30.	Kecamatan Trawas
31.	Kecamatan Pungging
32.	Kecamatan Puri
33.	Kecamatan Sooko
34.	Kecamatan Gedeg
35.	Kecamatan Kemlagi
36.	Kecamatan Jatilejo
37.	Kecamatan Gondang
38.	Kecamatan Pacet
39.	Kecamatan Ngoro
40.	Kecamatan Kutorejo
41.	Kecamatan Mojosari
42.	Kecamatan Dlanggu
43.	Kecamatan Bangsal
44.	Kecamatan Trowulan
45.	Kecamatan Mojoanyar
46.	Kecamatan Jetis
48.	Kecamatan Dawarblandong

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan di dukung oleh 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

12.Persentase Kecamatan Layak Anak

Target 33,33% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
Jumlah Kecamatan yang layak anak	
_____	X 100 %
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto	

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{6 \text{ Kecamatan}}{18 \text{ Kecamatan}} \times 100 \% = 33,33\%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{18 \text{ Kecamatan}}{18 \text{ Kecamatan}} \times 100 \% = 100$$

DP2KBP2 telah melakukan Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak (KELANA) di 18 Kecamatan dan mempunyai Forum Anak di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Perolehan dari Indikator Program Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Prosentase Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dukung dengan 2 kegiatan, 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DESA LAYAK ANAK DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	KEC. LAYAK ANAK
1	2	3	8
1.Bangsals	1	Bangsals	V
	2	Gayams	
	3	Kedunguneng	
	4	Kutoporong	
	5	Mejoyo	
	6	Mojotamping	
	7	Ngastemi	
	8	Ngrowo	
	9	Pacing	
	10	Pekuwon	
	11	Peterongan	
	12	Puloniti	
	13	Salen	
	14	Sidomulyo	
	15	Sumbertebu	
	16	Sumberwono	
	17	Tinggarbuntut	

-			
2. Dawarblandong	1	<u>Bangeran</u>	V
	2	<u>Banyulegi</u>	
	3	<u>Brayublandong</u>	
	4	<u>Cinanadang</u>	
	5	<u>Cendoro</u>	
	6	<u>Dawarblandong</u>	
	7	<u>Gunungan</u>	
	8	<u>Gunungasri</u>	
	9	<u>Iairowo</u>	
	10	<u>Madureso</u>	
	11	<u>Pucuk</u>	
	12	<u>Pulorejo</u>	
	13	<u>Randegan</u>	
	14	<u>Simongangrok</u>	
	15	<u>Sumberwuluh</u>	
	16	<u>Suru</u>	
	17	<u>Talunblanding</u>	
	18	<u>Temuireng</u>	
-			
3. Dlanggu	1	<u>Dlanggu</u>	
	2	<u>Irambe</u>	
	3	<u>Kalen</u>	
	4	<u>Kedunggede</u>	
	5	<u>Kedunglengkong</u>	
	6	<u>Mojokarang</u>	
	7	<u>Ngembek</u>	
	8	<u>Pohkecik</u>	
	9	<u>Punggul</u>	
	10	<u>Randudenenga</u>	
	11	<u>Sambilawang</u>	
	12	<u>Segunung</u>	
	13	<u>Sumberkarang</u>	
	14	<u>Sumbersono</u>	
	15	<u>Talok</u>	
	16	<u>Tumapel</u>	
-			
4. Gedeg	1	<u>Balongsari</u>	
	2	<u>Bandung</u>	
	3	<u>Batankrajan</u>	
	4	<u>Beratwetan</u>	
	5	<u>Gedeg</u>	
	6	<u>Gembongan</u>	
	7	<u>Gemolkerep</u>	
	8	<u>Ierukseger</u>	
	9	<u>Kemantren</u>	
	10	<u>Ngareskidul</u>	
	11	<u>Pagerluyung</u>	
	12	<u>Pagerejo</u>	
	13	<u>Sidoharjo</u>	
	14	<u>Terusan</u>	
-			
5.Gondang	1	<u>Bakalan</u>	V
	2	<u>Centong</u>	
	3	<u>Gondang</u>	
	4	<u>Gumeng</u>	
	5	<u>Begaganlimo</u>	
	6	<u>Kalikatir</u>	
	7	<u>Dilem</u>	
	8	<u>Ngembat</u>	
	9	<u>Jatidukuh</u>	

	10	<u>Bening</u>	
	11	<u>Karangkuen</u>	
	12	<u>Tawar</u>	
	13	<u>Pohjeier</u>	
	14	<u>Wonoploso</u>	
	15	<u>Pugeran</u>	
	16	<u>Kebontunggal</u>	
	17	<u>Kemasantani</u>	
	18	<u>Padi</u>	
-			
6. Jatirejo	1	<u>Baureno</u>	
	2	<u>Bleberan</u>	
	3	<u>Dinoyo</u>	
	4	<u>Dukuhngarjo</u>	
	5	<u>Gading</u>	
	6	<u>Gebangsari</u>	
	7	<u>Jatirejo</u>	
	8	<u>Jembul</u>	
	9	<u>Karangjeruk</u>	
	10	<u>Kumitir</u>	
	11	<u>Lebakjabung</u>	
	12	<u>Manting</u>	
	13	<u>Mojogeneng</u>	
	14	<u>Pandanasri</u>	
	15	<u>Rejosari</u>	
	16	<u>Sumberagung</u>	
	17	<u>Sumberjati</u>	
	18	<u>Sumengko</u>	
	19	<u>Tawangrejo</u>	
-			
7. Jetis	1	<u>Banjarsari</u>	
	2	<u>Bendung</u>	
	3	<u>Canggu</u>	
	4	<u>Jetis</u>	
	5	<u>Jolotundo</u>	
	6	<u>Kupang</u>	
	7	<u>Lakardowo</u>	
	8	<u>Mlirip</u>	
	9	<u>Mojorejo</u>	V
	10	<u>Mojolebak</u>	
	11	<u>Ngabar</u>	
	12	<u>Parengan</u>	
	13	<u>Penompo</u>	
	14	<u>Perning</u>	
	15	<u>Sawo</u>	
	16	<u>Sidorejo</u>	
-			
8. Kemlagi	1	<u>Beratkulon</u>	
	2	<u>Betro</u>	
	3	<u>Japanan</u>	
	4	<u>Kedungsari</u>	
	5	<u>Kemlagi</u>	
	6	<u>Mojodadi</u>	
	7	<u>Mojodowo</u>	
	8	<u>Mojogebang</u>	
	9	<u>Mojojajar</u>	
	10	<u>Mojokumpul</u>	
	11	<u>Mojokusumo</u>	
	12	<u>Mojopilang</u>	
	13	<u>Mojorejo</u>	
	14	<u>Mojosari-rejo</u>	V

	15	<u>Mojowates-rejo</u>	
	16	<u>Mojowiryo</u>	
	17	<u>Mojowono</u>	
	18	<u>Pandankrajan</u>	
	19	<u>Tanjungan</u>	
	20	<u>Watesprojo</u>	
-			
9. Kutorejo	1	<u>Gedangan</u>	V
	2	<u>Iiyu</u>	
	3	<u>Kaligoro</u>	
	4	<u>Karangasem</u>	
	5	<u>Karangdiyeng</u>	
	6	<u>Kepuharum</u>	
	7	<u>Kepuhpandak</u>	
	8	<u>Kertosari</u>	
	9	<u>Kutorejo</u>	
	10	<u>Payungrejo</u>	
	11	<u>Pesanggrahan</u>	
	12	<u>Sampangagung</u>	
	13	<u>Sawo</u>	
	14	<u>Simbaringin</u>	
	15	<u>Singowangi</u>	
	16	<u>Windurejo</u>	
	17	<u>Wonodadi</u>	
-			
10. Mojoanyar	1	<u>Gayaman</u>	V
	2	<u>Gebangmalang</u>	
	3	<u>Jabon</u>	
	4	<u>Jumeneng</u>	
	5	<u>Kepuhanyar</u>	
	6	<u>Kwatu</u>	
	7	<u>Kwedenkembar</u>	
	8	<u>Lengkong</u>	
	9	<u>Ngarjo</u>	
	10	<u>Sadartengah</u>	
	11	<u>Sumberjati</u>	
	12	<u>Wunut</u>	
-			
11. Mojosari	1	<u>Awang-Awang</u>	
	2	<u>Belahantengah</u>	
	3	<u>Iotangan</u>	
	4	<u>Kebondalem</u>	
	5	<u>Kedunggempol</u>	
	6	<u>Leminggir</u>	
	7	<u>Menanggal</u>	
	8	<u>Modopuro</u>	
	9	<u>Mojosulur</u>	
	10	<u>Ngimbangan</u>	
	11	<u>Pekukuhan</u>	
	12	<u>Randubango</u>	
	13	<u>Seduri</u>	
	14	<u>Sumbertanggul</u>	
	1	<u>Kauman</u>	
	2	<u>Mojosari</u>	
	3	<u>Sarirejo</u>	
	4	<u>Sawahan</u>	
	5	<u>Wonokusumo</u>	
-		-	
12. Ngoro	1	<u>Bandarasri</u>	V
	2	<u>Candiharjo</u>	
	3	<u>Jasem</u>	

	4	<u>Kembangsri</u>	
	5	<u>Kesemen</u>	
	6	<u>Kuniorowesi</u>	
	7	<u>Kutogirang</u>	
	8	<u>Lolawang</u>	
	9	<u>Manduro Manggung Gajah</u>	
	10	<u>Ngoro</u>	
	11	<u>Purwojati</u>	
	12	<u>Sedati</u>	
	13	<u>Srigading</u>	
	14	<u>Sukoanyar</u>	
	15	<u>Tambakrejo</u>	
	16	<u>Tanjangrono</u>	
	17	<u>Watesnegoro</u>	
	18	<u>Watomas Jedong</u>	
	19	<u>Wonosari</u>	
-			
<u>13. Pacet</u>	1	<u>Bendunganjati</u>	V
	2	<u>Candiwatu</u>	
	3	<u>Cembor</u>	
	4	<u>Cepokolimo</u>	
	5	<u>Claket</u>	
	6	<u>Kembangbelor</u>	
	7	<u>Kemiri</u>	
	8	<u>Kesimantengah</u>	
	9	<u>Kuripansari</u>	
	10	<u>Mojokembang</u>	
	11	<u>Nogosari</u>	
	12	<u>Pacet</u>	
	13	<u>Padusan</u>	
	14	<u>Pandamarum</u>	
	15	<u>Petak</u>	
	16	<u>Sajen</u>	
	17	<u>Sumberkembar</u>	
	18	<u>Tanjungkenongo</u>	
	19	<u>Warugunung</u>	
	20	<u>Wiyu</u>	
-			
<u>14. Pungging</u>	1	<u>Balongmasin</u>	
	2	<u>Bangun</u>	
	3	<u>Banjartanggul</u>	
	4	<u>Curahmojo</u>	
	5	<u>Jabontegal</u>	
	6	<u>Jatilangkung</u>	
	7	<u>Kalipuro</u>	
	8	<u>Kedungmungal</u>	
	9	<u>Kembangringgit</u>	
	10	<u>Lebaksono</u>	
	11	<u>Mojorejo</u>	
	12	<u>Ngrame</u>	
	13	<u>Pungging</u>	
	14	<u>Purworejo</u>	
	15	<u>Randuharjo</u>	
	16	<u>Sekargadung</u>	
	17	<u>Tempuran</u>	
	18	<u>Tunggalpager</u>	
	19	<u>Watukenongo</u>	
-		-	
<u>15. Puri</u>	1	<u>Balongmojo</u>	V
	2	<u>Banjaragung</u>	
	3	<u>Brayung</u>	

	4	<u>Katemasdungus</u>	
	5	<u>Kebonagung</u>	
	6	<u>Kenanten</u>	
	7	<u>Kintelan</u>	
	8	<u>Medali</u>	
	9	<u>Mlaten</u>	
	10	<u>Plososari</u>	
	11	<u>Puri</u>	
	12	<u>Sumbergirang</u>	
	13	<u>Sumolawang</u>	
	14	<u>Tambakagung</u>	
	15	<u>Tampungrejo</u>	
	16	<u>Tangunan</u>	
-			
16. Sooko	1	<u>Blimbingsari</u>	
	2	<u>Brangkal</u>	
	3	<u>Gemekan</u>	
	4	<u>Jampirogo</u>	
	5	<u>Japan</u>	
	6	<u>Karangkedawang</u>	
	7	<u>Kedungmaling</u>	
	8	<u>Klinterejo</u>	
	9	<u>Modongan</u>	
	10	<u>Mojoranu</u>	
	11	<u>Ngingasrembyong</u>	
	12	<u>Sambiroto</u>	
	13	<u>Sooko</u>	
	14	<u>Tempuran</u>	
	15	<u>Wringinrejo</u>	
-			
17. Trawas	1	<u>Belik</u>	
	2	<u>Duyung</u>	
	3	<u>Jatijejer</u>	
	4	<u>Kedungudi</u>	
	5	<u>Kesiman</u>	
	6	<u>Ketapanrame</u>	
	7	<u>Penanggungan</u>	
	8	<u>Seloliman</u>	
	9	<u>Selotapak</u>	
	10	<u>Sugeng</u>	
	11	<u>Sukosari</u>	
	12	<u>Tamiajeng</u>	
	13	<u>Trawas</u>	
-			
18. Trowulan	1	<u>Balongwono</u>	
	2	<u>Bejiijong</u>	
	3	<u>Beloh</u>	
	4	<u>Bicak</u>	
	5	<u>Domas</u>	
	6	<u>Jambuwok</u>	
	7	<u>Jatipasar</u>	
	8	<u>Kejagan</u>	
	9	<u>Pakis</u>	
	10	<u>Panggih</u>	
	11	<u>Sentonorejo</u>	
	12	<u>Tawang Sari</u>	
	13	<u>Temon</u>	
	14	<u>Trowulan</u>	
	15	<u>Watesumpak</u>	
	16	<u>Wonorejo</u>	
-			

13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak

Target 8,55% terealisasi 72,37 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
Jumlah desa/kelurahan yang layak anak	X 100 %
Jumlah desa /kelurahan di Kabupaten Mojokerto	

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun 2022
$\frac{26 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 8,55$	$\frac{220 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 72,37$

DP2KBP2 telah melakukan pendampingan Desa Layak Anak di 304 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai tindak lanjut telah terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak di Kelurahan masing-masing. Dan untuk pengembangan di tingkat Kecamatan menjadi Layak Anak juga. Harapannya adalah pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak, akan menjadikan semua anak-anak di tiap kelurahan memiliki tumbuh kembang yang optimal, merasa aman dan nyaman tinggal di Kabupaten Mojokerto.

REKAPITULASI DESA/KELURAHAN LAYAK

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	DESA LAYAK ANAK
1	2	3	5
1.Bangsals	1	Bangsals	
	2	Gayams	
	3	Kedunguneng	
	4	Kutoporong	
	5	Mejoyo	V
	6	Mojotamping	V
	7	Ngastemi	
	8	Ngrowo	V
	9	Pacing	V
	10	Pekuwon	V
	11	Peterongan	
	12	Puloniti	V
	13	Salen	V
	14	Sidomulyo	V
	15	Sumbertebu	
	16	Sumberwono	
	17	Tinggarbuntut	V
-		Jumlah	9
2.Dawarblandong	1	Bangeran	
	2	Banyulegi	
	3	Brayublandong	
	4	Cinanadang	
	5	Cendoro	
	6	Dawarblandong	
	7	Gunungan	

	8	<u>Gunungasri</u>	
	9	<u>Jairowo</u>	
	10	<u>Madureso</u>	
	11	<u>Pucuk</u>	
	12	<u>Pulorejo</u>	
	13	<u>Randegan</u>	
	14	<u>Simongangrok</u>	
	15	<u>Sumberwuluh</u>	
	16	<u>Suru</u>	
	17	<u>Talunblanding</u>	
	18	<u>Temuireng</u>	
-		jumlah	
3. Dlanggu	1	<u>Dlanggu</u>	V
	2	<u>Irambe</u>	V
	3	<u>Kalen</u>	V
	4	<u>Kedunggede</u>	V
	5	<u>Kedunglengkong</u>	V
	6	<u>Mojokarang</u>	V
	7	<u>Ngembah</u>	V
	8	<u>Pohkecik</u>	V
	9	<u>Punggul</u>	V
	10	<u>Randudenenga</u>	V
	11	<u>Sambilawang</u>	V
	12	<u>Segunung</u>	V
	13	<u>Sumberkarang</u>	V
	14	<u>Sumbersono</u>	V
	15	<u>Talok</u>	V
	16	<u>Tumapel</u>	V
-		jumlah	16
4. Gedeg	1	<u>Balongsari</u>	V
	2	<u>Bandung</u>	V
	3	<u>Batankrajan</u>	V
	4	<u>Beratwetan</u>	V
	5	<u>Gedeg</u>	V
	6	<u>Gembongan</u>	V
	7	<u>Gemolkerep</u>	V
	8	<u>Ierukseger</u>	V
	9	<u>Kemantren</u>	V
	10	<u>Ngareskidul</u>	V
	11	<u>Pagerluyung</u>	V
	12	<u>Pagerejo</u>	V
	13	<u>Sidoharjo</u>	V
	14	<u>Terusan</u>	V
-		jumlah	14
5. Gondang	1	<u>Bakalan</u>	V
	2	<u>Centong</u>	V
	3	<u>Gondang</u>	V
	4	<u>Gumeng</u>	V
	5	<u>Begaganlimo</u>	V
	6	<u>Kalikatir</u>	V
	7	<u>Dilem</u>	V
	8	<u>Ngembat</u>	V
	9	<u>Iatidukuh</u>	V
	10	<u>Bening</u>	V
	11	<u>Karangkuen</u>	V
	12	<u>Tawar</u>	V
	13	<u>Pohjejer</u>	V
	14	<u>Wonoploso</u>	V
	15	<u>Pugeran</u>	V
	16	<u>Kebontunggal</u>	V

	17	Kemasantani	V
	18	Padi	V
-		Jumlah	18
6. Jatirejo	1	Baureno	V
	2	Bleberan	V
	3	Dinoyo	V
	4	Dukuhngarjo	V
	5	Gading	V
	6	Gebangsari	V
	7	Jatirejo	V
	8	Jembul	V
	9	Karangieruk	V
	10	Kunitir	V
	11	Lebakjabung	V
	12	Manting	V
	13	Mojogeneng	
	14	Pandanasri	V
	15	Rejosari	V
	16	Sumberagung	V
	17	Sumberjati	V
	18	Sumengko	V
	19	Tawangrejo	V
-		Jumlah	18
7. Jetis	1	Banjarsari	V
	2	Bendung	V
	3	Canggu	V
	4	Jetis	V
	5	Jolotundo	V
	6	Kupang	V
	7	Lakardowo	V
	8	Mlirip	V
	9	Mojorejo	V
	10	Mojolebak	V
	11	Ngabar	V
	12	Parengan	V
	13	Penompo	V
	14	Perning	
	15	Sawo	V
	16	Sidorejo	V
-		Jumlah	15
8. Kemlagi	1	Beratkulon	V
	2	Betro	V
	3	Japanan	V
	4	Kedungsari	V
	5	Kemlagi	V
	6	Mojodadi	V
	7	Mojodowo	V
	8	Mojogebang	V
	9	Mojojajar	V
	10	Mojokumpul	V
	11	Mojokusumo	V
	12	Mojopilang	V
	13	Mojorejo	V
	14	Mojosari-rejo	V
	15	Mojowates-rejo	V
	16	Mojowiryo	V
	17	Mojowono	V
	18	Pandankrajan	V
	19	Tanjungan	V
	20	Watesprojo	V

-		Jumlah	20
9. Kutorejo	1	<u>Gedangan</u>	V
	2	<u>Iiyu</u>	V
	3	<u>Kaligoro</u>	V
	4	<u>Karangasem</u>	V
	5	<u>Karangdiyeng</u>	V
	6	<u>Kepuharum</u>	V
	7	<u>Kepuhpandak</u>	V
	8	<u>Kertosari</u>	V
	9	<u>Kutorejo</u>	V
	10	<u>Payungrejo</u>	V
	11	<u>Pesanggrahan</u>	V
	12	<u>Sampangagung</u>	V
	13	<u>Sawo</u>	V
	14	<u>Simbaringin</u>	V
	15	<u>Singowangi</u>	V
	16	<u>Windurejo</u>	V
	17	<u>Wonodadi</u>	V
-		Jumlah	17
10. Mojoanyar	1	<u>Gayaman</u>	V
	2	<u>Gebangmalang</u>	V
	3	<u>labon</u>	V
	4	<u>Jumeneng</u>	V
	5	<u>Kepuhanyar</u>	V
	6	<u>Kwatu</u>	V
	7	<u>Kwedenkembar</u>	V
	8	<u>Lengkong</u>	V
	9	<u>Ngarjo</u>	V
	10	<u>Sadartengah</u>	V
	11	<u>Sumberjati</u>	V
	12	<u>Wunut</u>	V
-		Jumlah	12
11. Mojosari	1	<u>Awang-Awang</u>	
	2	<u>Belahantengah</u>	
	3	<u>lotangan</u>	
	4	<u>Kebondalem</u>	
	5	<u>Kedunggempol</u>	
	6	<u>Leminggir</u>	
	7	<u>Menanggal</u>	
	8	<u>Modopuro</u>	
	9	<u>Mojosulur</u>	
	10	<u>Ngimbangan</u>	
	11	<u>Pekukuhan</u>	
	12	<u>Randubango</u>	
	13	<u>Seduri</u>	
	14	<u>Sumbertanggul</u>	
	1	<u>Kauman</u>	
	2	<u>Mojosari</u>	
	3	<u>Sarirejo</u>	
	4	<u>Sawahan</u>	
	5	<u>Wonokusumo</u>	
-		-	
12. Ngoro	1	<u>Bandarasri</u>	
	2	<u>Candiharjo</u>	
	3	<u>Jasem</u>	
	4	<u>Kembangsri</u>	
	5	<u>Kesemen</u>	
	6	<u>Kunjorowesi</u>	
	7	<u>Kutogirang</u>	
	8	<u>Lolawang</u>	

	9	<u>Manduro Manggung Gajah</u>	
	10	<u>Ngoro</u>	
	11	<u>Purwojati</u>	
	12	<u>Sedati</u>	
	13	<u>Srigading</u>	
	14	<u>Sukoanyar</u>	
	15	<u>Tambakrejo</u>	
	16	<u>Taniangrono</u>	
	17	<u>Watesnegoro</u>	
	18	<u>Watonmas Jedong</u>	
	19	<u>Wonosari</u>	V
	-	jumlah	1
13. Pacet	1	<u>Bendunganjati</u>	V
	2	<u>Candiwatu</u>	V
	3	<u>Cembor</u>	V
	4	<u>Cepokolimo</u>	V
	5	<u>Claket</u>	V
	6	<u>Kembanghelor</u>	V
	7	<u>Kemiri</u>	V
	8	<u>Kesimantengah</u>	V
	9	<u>Kuripansari</u>	V
	10	<u>Mojokembang</u>	V
	11	<u>Nogosari</u>	V
	12	<u>Pacet</u>	V
	13	<u>Padusan</u>	V
	14	<u>Pandanarum</u>	V
	15	<u>Petak</u>	V
	16	<u>Sajen</u>	V
	17	<u>Sumberkembar</u>	V
	18	<u>Tanjungkenongo</u>	V
	19	<u>Warugunung</u>	V
	20	<u>Wiyu</u>	V
	-	jumlah	20
14. Pungging	1	<u>Balongmasin</u>	
	2	<u>Bangun</u>	
	3	<u>Banjartanggul</u>	
	4	<u>Curahmojo</u>	
	5	<u>Jahontegal</u>	
	6	<u>Jatilangkung</u>	
	7	<u>Kalipuro</u>	
	8	<u>Kedungmungal</u>	
	9	<u>Kembangringgit</u>	
	10	<u>Lebaksono</u>	
	11	<u>Mojorejo</u>	
	12	<u>Ngrame</u>	
	13	<u>Pungging</u>	
	14	<u>Purworejo</u>	
	15	<u>Randuharjo</u>	
	16	<u>Sekargadung</u>	
	17	<u>Tempuran</u>	
	18	<u>Tunggalpager</u>	
	19	<u>Watukenongo</u>	
	-	-	
15. Puri	1	<u>Balongmojo</u>	V
	2	<u>Banjaragung</u>	V
	3	<u>Brayung</u>	V
	4	<u>Katemasdungus</u>	V
	5	<u>Kebonagung</u>	V
	6	<u>Kenanten</u>	V
	7	<u>Kintelan</u>	V

	8	Medali	V
	9	Mlaten	V
	10	Plososari	V
	11	Puri	V
	12	Sumbergirang	V
	13	Sumolawang	V
	14	Tambakagung	V
	15	Tampungrejo	V
	16	Tangunan	V
-		Jumlah	16
16. Sooko	1	Blimbingsari	V
	2	Brangkal	V
	3	Gemekan	V
	4	Jampirogo	V
	5	Japan	V
	6	Karangkedawang	V
	7	Kedungmaling	V
	8	Klinterejo	V
	9	Modongan	V
	10	Mojoranu	V
	11	Ngingasrembyong	V
	12	Sambiroto	V
	13	Sooko	V
	14	Tempuran	V
	15	Wringinrejo	V
-		Jumlah	15
17. Trawas	1	Belik	V
	2	Duyung	V
	3	Jatijejer	V
	4	Kedungudi	V
	5	Kesiman	V
	6	Ketapanrame	V
	7	Penanggungan	V
	8	Seloliman	V
	9	Selotapak	V
	10	Sugeng	V
	11	Sukosari	V
	12	Tamiajeng	V
	13	Trawas	V
-		Jumlah	13
18. Trowulan	1	Balongwono	V
	2	Bejiijong	V
	3	Beloh	V
	4	Bicak	V
	5	Domas	V
	6	Jambuwok	V
	7	Jatipasar	V
	8	Kejagan	V
	9	Pakis	V
	10	Panggih	V
	11	Sentonorejo	V
	12	Tawangsari	V
	13	Temon	V
	14	Trowulan	V
	15	Watesumpak	V
	16	Wonorejo	V
-		Jumlah	16
TOTAL			220

Sumber Data Bidang PPPA

CONTOH SK DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DELANA)



KEPALA DESA BENING
DESA BENING

KEPUTUSAN DESA BENING
NOMOR : 188.45/009/KEP/416-302.07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DELANA)
DESA BENING

KEPALA DESA BENING

Menimbang : a bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan memiliki ciri adat khusus, yang menjamin sifat kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

b bahwa Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DELANA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;

c bahwa guna mendukung upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa BENING yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan BENING

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENING
NOMOR : 188.45/009/KEP/416-302.07/2022
TANGGAL : 21 Mei 2022

URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DI DESA BENING

NO	UNSUR	PERANAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	Menggalang sumber daya dan dana, memfasilitasi, mengkoordinasi, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan memonitor program Desa Layak Anak	Koordinator
2	Bidai Desa	Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan di wilayah kerja Desa
3	Kepala Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah	Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah	Ketua Gugus Tugas Bidang Pendidikan
4	PPKSD	Mengkoordinasikan program di bidang pemerintahan desa	Sekretariat
5	Ketua YP-PKK Desa	Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi	
6	Yusuf Komunitas Sosial Desa (Yusuf Kowid)	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial	
7	Perwakilan PKRT Desa	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	
8	Anggota Poksi Anak	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial dan lingkungan /C4H (Caring Home Community Health)	

9. Petugas P2H

10. Petugas Lintas



14. **Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang mendapatkan layanan**

Target 40,74% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

Jumlah korban anak dan ABH yang melapor ke P2TP2A

X 100 %

Jumlah korban anak dan ABH se kabupaten Mojokerto yang melapor

Perhitungan Target Tahun 2022

22 Korban

54 Korban

X 100 % = 40,74 %

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

1 Korban

1 Korban

X 100 % = 100 %

Ada 1 korban Anak yang berhadapan dengan hukum yang melapor ke P2TP2A dari kecamatan Mojosari, dan telah di tangani oleh P2TP2A bekerja sama dengan polres Mojosari dan kasus telah di nyatakan selesai.

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dukung dengan 3 kegiatan, 7 sub kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Sub Kegiatan Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

- c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

FOTO SAAT PENDAMPINGAN KORBAN DI POLRES MOJOKERTO



SASARAN KINERJA 2

Sasaran Kinerja yang ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Terealisasi Sesuai Target.
2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.
3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
5. Nilai RB Perangkat Daerah

Dari empat indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Terealisasi Sesuai Target.

Target 90 % terealisasi 80 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
Jumlah program yang berhasil mencapai target	X 100 %
Jumlah program di DP2KBP2	

Perhitungan Target Tahun 2022	Perhitungan Realisasi Tahun 2022
$\frac{9 \text{ Program}}{10 \text{ Program}} \times 100 \% = 90 \%$	$\frac{8 \text{ Program}}{10 \text{ Program}} \times 100 \% = 80 \%$

Adapun Program DP2KBP2 Tahun 2022 sebanyak 10 Program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Dengan indikator prosentase kelembagaan daerah dan responsif gender, Target 80,36 % realisasi 66,67 % dengan capaian 82,96 %
2. Program Perlindungan Perempuan
Dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan, Target 100 % realisasi 100% dengan capaian 100 %
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Dengan indikator prosentase Kepala Desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG, Target 38,89 realisasi 100% dengan capaian 100 %
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Dengan indikator prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak dengan realisasi 100%
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Dengan indikator
 - a. Kecamatan layak anak, target 33,33 % realisasi 100%, dengan capaian 100 %
 - b. Desa/Kelurahan layak anak, target 8,55 % realisasi 72,37% dengan capaian 100 %
6. Program Perlindungan Khusus Anak
Dengan indikator prosentase korban anak dan ABH (Anak yang berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan layanan, target 40,74 % realisasi 100% dengan capaian 100 %

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah, target 83,78 (A) realisasi 83,87 (A) dengan capaian 100 %

8. Program Pengendalian Penduduk

Dengan indikator prosentase program bangga kencana dan data keluarga yang dilaporkan, target 100 % realisasi 100 % dengan capaian 100 %

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dengan indikator prosentase PUS yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana, target 80,56 % realisasi 80,73% dengan capaian 100 %

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dengan indikator prosentase kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang aktif, target 97,81 % realisasi 95,48 % dengan capaian 97,62 %

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.

Target 85 % terealisasi 84,67 %

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 18.760.987.400,00
Anggaran Setelah Perubahan PAPBD	Rp. 20.080.700.356,00
Realisasi	Rp. 17.001.692.415,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 3.079.007.941,00

Dapat dilihat dari data sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022											
BULAN : DESEMBER 2022											
NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KONTRAK (Rp.)	REALISASI (Rp.)		SISA	PELAKSANA	PRESENTASE (%)		REK.	
1	2	3	4	S/D BLN LALU	BULN INI	S/D BLN INI		REU	PISIK		
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.000.000,00	0,00	9.056.250,00	0,00	9.056.250,00	143.750,00		90,56%	0,00%	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000,00	0,00	24.409.700,00	0,00	24.409.700,00	590.300,00		97,64%	0,00%	
	Sentilasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.000.000,00	0,00	96.177.650,00	11.554.000,00	97.731.650,00	2.268.350,00		97,73%	99,00%	
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	367.144.000,00	0,00	90.475.415,00	262.307.000,00	360.782.415,00	6.361.585,00		90,27%	90,00%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.825.000,00	0,00	16.438.000,00	33.466.400,00	49.904.400,00	920.600,00		90,19%	90,00%	
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.394.600,00	0,00	9.394.600,00	605.400,00		93,95%	0,00%	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.044.638,00	0,00	67.226.600,00	0,00	67.226.600,00	818.038,00		90,80%	0,00%	
6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	48.888.000,00	0,00	48.888.000,00	1.112.000,00		97,78%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	66.863.559,00	0,00	31.615.800,00	32.475.000,00	64.090.800,00	2.772.759,00		95,85%	96,00%	
7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemangangan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.947.500,00	0,00	9.947.500,00	52.500,00		99,48%	0,00%	
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.649.750,00	0,00	9.649.750,00	350.250,00		96,50%	0,00%	
9	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	24.287.000,00	0,00	24.287.000,00	713.000,00		97,15%	0,00%	
10	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	120.000,00		90,80%	0,00%	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	49.343.100,00	0,00	49.343.100,00	656.900,00		90,69%	0,00%	
12	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	1.900.000,00		81,00%	0,00%	
13	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.002.000,00	0,00	9.002.000,00	998.000,00		90,02%	0,00%	
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	9.403.000,00	0,00	9.403.000,00	597.000,00		94,03%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.044.637,00	0,00	18.036.000,00	0,00	18.036.000,00	8.637,00		99,95%	0,00%	
15	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.365.000,00	0,00	9.416.000,00	8.361.200,00	17.777.200,00	587.800,00		96,80%	97,00%	
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	91.863.559,00	0,00	75.690.900,00	14.580.000,00	90.190.900,00	1.672.659,00		90,18%	90,00%	
17	Pengkatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	55.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00		100,00%	100,00%	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	8.940.000,00	0,00	8.940.000,00	1.060.000,00		89,40%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.540.707,00	0,00	23.940.400,00	0,00	23.940.400,00	600.307,00		97,55%	0,00%	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	0,00	5.135.000,00	1.607.500,00	6.742.500,00	757.500,00		80,90%	90,00%	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	0,00	4.762.500,00	1.600.000,00	6.362.500,00	1.137.500,00		84,83%	85,00%	

21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.322.816.000,00	0,00	4.260.145.298,00	502.300.521,00	4.762.445.819,00	560.370.181,00	89,47%	89,00%
	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.800.000,00	0,00	0,00	46.215.000,00	46.215.000,00	585.000,00	98,75%	99,00%
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.279.000,00	0,00	65.491.065,00	-309.000,00	65.182.065,00	3.496.935,00	94,91%	95,00%
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	0,00	5.880.000,00	2.814.000,00	8.694.000,00	3.306.000,00	72,45%	72,00%
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	25.000.000,00	0,00	24.992.000,00	0,00	24.992.000,00	8.000,00	99,97%	0,00%
25	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	0,00	7.150.000,00	650.000,00	7.800.000,00	1.200.000,00	86,57%	87,00%
26	Penyediaan Bahan/Material	29.000.000,00	0,00	27.622.000,00	0,00	27.622.000,00	1.378.000,00	95,25%	0,00%
27	Facilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	0,00	3.683.000,00	1.040.000,00	4.723.000,00	2.277.000,00	67,47%	67,00%
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.450.000,00	0,00	44.930.000,00	10.820.000,00	55.750.000,00	11.700.000,00	82,55%	83,00%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.428.850,00	0,00	67.137.250,00	5.756.065,00	72.893.315,00	11.535.535,00	86,34%	86,00%
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.622.400,00	0,00	51.697.920,00	4.308.160,00	56.006.080,00	8.616.320,00	86,67%	87,00%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.825.400,00	0,00	102.403.475,00	4.267.800,00	106.671.275,00	13.154.125,00	89,02%	89,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.703.606,00	0,00	59.762.700,00	3.747.506,00	63.510.206,00	2.193.406,00	96,66%	97,00%
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	18.285.000,00	0,00	18.285.000,00	1.715.000,00	91,43%	0,00%
33	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	170.000.000,00	0,00	167.648.700,00	-4.944.000,00	162.704.700,00	7.295.300,00	95,71%	96,00%
34	Memberikan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Interaksi Program KKBPK di Sektor Lain	25.000.000,00	0,00	20.830.000,00	0,00	20.830.000,00	4.170.000,00	83,32%	0,00%
35	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.465.000,00	0,00	35.114.000,00	0,00	35.114.000,00	351.000,00	99,01%	0,00%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	171.400.000,00	0,00	146.481.500,00	21.288.000,00	167.770.300,00	3.629.700,00	97,88%	98,00%
37	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
38	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	0,00	4.833.350,00	0,00	4.833.350,00	341.650,00	92,19%	0,00%
39	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	0,00	24.543.000,00	0,00	24.543.000,00	457.000,00	98,17%	0,00%
40	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	95.640.000,00	0,00	91.505.240,00	2.350.000,00	93.855.240,00	1.784.760,00	98,13%	98,00%
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penceritaan Program KKBPK	25.000.000,00	0,00	24.937.000,00	0,00	24.937.000,00	63.000,00	99,75%	0,00%
42	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Dakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minaloka)	305.800.000,00	0,00	228.859.000,00	67.320.000,00	296.179.000,00	9.621.000,00	96,85%	97,00%
43	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	729.000.000,00	0,00	646.610.000,00	82.389.956,00	728.999.956,00	44,00	100,00%	100,00%
44	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	2.000.000,00	95,00%	0,00%
45	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.197.000.000,00	0,00	898.011.000,00	298.910.000,00	1.196.921.000,00	79.000,00	99,99%	99,00%
46	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100.000.000,00	0,00	94.466.150,00	3.360.000,00	97.826.150,00	2.173.850,00	97,83%	98,00%
47	Penggiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Penguat Keluarga Berencana/Pemupuk Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	50.000.000,00	0,00	48.973.000,00	0,00	48.973.000,00	1.027.000,00	97,95%	0,00%
48	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.459.200.000,00	0,00	1.337.600.000,00	121.600.000,00	1.459.200.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.900.000,00	0,00	38.663.400,00	1.900.600,00	40.564.000,00	3.336.000,00	92,40%	92,00%
50	Peningkatan Keterampilan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.038.439.000,00	0,00	983.521.900,00	14.500.000,00	998.021.900,00	40.417.100,00	96,11%	96,00%
51	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.000.000,00	0,00	9.418.700,00	0,00	9.418.700,00	581.300,00	94,19%	0,00%
52	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.165.845.000,00	0,00	746.875.800,00	248.958.600,00	995.834.400,00	170.010.600,00	85,42%	85,00%
53	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Jermank Jaringan dan Jejaringnya	15.600.000,00	0,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	1.558.000,00	90,11%	0,00%
54	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayana Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	10.000.000,00	0,00	9.004.000,00	0,00	9.004.000,00	996.000,00	90,04%	0,00%
55	Integrasi Pembangunan Listas Sektor di Kampung KB	10.000.000,00	0,00	5.771.500,00	0,00	5.771.500,00	4.228.500,00	57,72%	0,00%
56	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	680.500.000,00	0,00	655.847.000,00	20.143.000,00	675.990.000,00	4.510.000,00	99,34%	99,00%
57		20.000.000,00	0,00	19.896.700,00	0,00	19.896.700,00	103.300,00	99,48%	0,00%

58	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000,00	0,00	125.160.000,00	0,00	125.160.000,00	24.840.000,00	83,44%	0,00%
59	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000,00	0,00	9.372.400,00	0,00	9.372.400,00	627.600,00	93,72%	0,00%
60	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000,00	0,00	9.867.500,00	0,00	9.867.500,00	132.500,00	98,68%	0,00%
61	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.032.520.000,00	0,00	1.660.485.000,00	1.237.505.000,00	2.897.990.000,00	2.134.530.000,00	57,59%	58,00%
62	Penggerakan Kegiatan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terwujudnya PK	25.000.000,00	0,00	24.936.100,00	0,00	24.936.100,00	63.900,00	99,74%	0,00%
63	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	328.000.000,00	0,00	249.404.000,00	66.950.000,00	316.354.000,00	11.646.000,00	96,45%	96,00%
64	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000,00	0,00	9.906.500,00	0,00	9.906.500,00	93.500,00	99,07%	0,00%
	JUMLAH	20.080.700.356,00	0,00	13.866.979.313,00	3.134.713.102,00	17.001.692.415,00	3.079.007.941,00	84,67%	

3. Indeks Profesionalitas ASN

Target 65,39 terealisasi 58,44 (Capaian Tahun 2021)

Indeks Profesionalitas ASN di dapat kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

Listing Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 Pemerintah Kab. Mojokerto										
Kondisi tanggal : 10-06-2022				IP ASN Perangkat Daerah : 58,43 (Sangat Rendah)						
NO.	NIP	NAMA PNS (TANPA GELAR)	JABATAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI	PERANGKAT DAERAH
1	197007 231992 032005	UTAMININGSIH	Jabatan Struktural	20	40	25	5	90	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
2	196706 021988 032006	SUDARMIATI	Jabatan Struktural	15	40	25	5	85	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
3	196510 271990 032005	RATNA RUFAIDA	Jabatan Struktural	10	40	25	5	80	Sedang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
4	197210 102010 011007	IMAM SOFI I	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
5	198009 152010 012004	NUR' IMAMA UMIZAKIYAH	Jabatan Fungsional	15	30	25	5	75	Sedang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
6	196309 081996 031002	SUJATMIKO	Jabatan Struktural	20	25	25	5	75	Sedang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
7	197511 062009 031001	MUCH. YUNUS	Pelaksana	20	22.5	25	5	73	Sedang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
8	196909 042008 012022	ATIK NUR KHOMARI' AH	Jabatan Struktural	15	25	25	5	70	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
9	197405 242002 122001	ETTI NOERCHAYATI	Pelaksana	15	22.5	25	5	68	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
10	198506 192005 012002	HALIMATUS SA'DIYAH	Pelaksana	15	22.5	25	5	68	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
11	196807 282009 061001	MACHSUN	Pelaksana	15	22.5	25	5	68	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
12	199411 302019 032019	MELINDA INDRYANA RIYANTO	Pelaksana	15	22.5	25	5	68	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
13	196803 281993 121001	ABDUL KHOLIQ NURDWIYANTO	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
14	196609 121998 032002	ANI WIDYASTUTI	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN
15	197403 222000 032003	NANUS NUSLINI	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN

16	197010 201994 032004	PEMLIA RUWAHAYANTI	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
17	196605 061989 032009	SITI ASIAH	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
18	197203 131997 032001	SUSY DWIHARINI	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
19	196703 201986 032002	WAHYUNINGTIYAS	Jabatan Struktural	20	15	25	5	65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
20	196512 281992 031011	AWAN PRIHWANTOMO	Jabatan Struktural	15	15	25	5	60	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
21	197507 202010 011005	HARID LESTARI	Pelaksana	5	22.5	25	5	58	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
22	197706 112001 121003	HONEY KURNIAWAN	Pelaksana	5	22.5	25	5	58	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
23	197403 052007 011019	SATRIO MUKTI	Pelaksana	5	22.5	25	5	58	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
24	196508 191989 031012	SLAMET HARIYANTO	Pelaksana	5	22.5	25	5	58	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
25	197909 272009 012003	ANITA CINDY WIDYA PUTRI	Jabatan Struktural	15	10	25	5	55	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
26	197105 062009 011003	A. WAHIB	Pelaksana	5	17.5	25	5	53	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
27	198207 012010 011014	EKA YULI SETYAWAN	Jabatan Struktural	20	0	25	5	50	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
28	196706 201996 031004	MOKHAMAD SUGENG PURWANTO	Jabatan Struktural	20	0	25	5	50	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
29	196805 091993 121001	NANANG RISDIYANTO	Jabatan Struktural	15	0	30	5	50	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
30	197308 252006 042017	NURUL DIAH REJEKI	Jabatan Fungsional	20	0	25	5	50	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
31	197107 032010 011003	AHMAD JAINURI	Pelaksana	15	0	25	5	45	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

32	197901 012006 041030	HARRY WICAKSONO	Jabatan Struktural	15	0	25	5	45	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
33	197211 122001 121001	ISMADI	Pelaksana	15	0	25	5	45	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
34	196802 192009 062001	LULUK RETNOWATI	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
35	197208 182007 012012	SUGIYATI	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
36	196609 221991 021001	LUKMAN ROSYADI	Pelaksana	1	0	25	5	31	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NILAI IP ASN				14,06	14,23	25,14	5,00	58,43	Sangat Rendah	

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target 83,78 (A) terealisasi 83,87 (A)

Nilai SAKIP Perangkat daerah di dapat dari 4 komponen :

1. Perencanaan Kinerja.
2. Pengukuran Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

FOTO COVER LHE INSPEKTORAT



Hasil penilaian per komponen oleh inspektorat

5. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	28,98
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,99
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,85
Jumlah	100,00	83,87

5. Nilai RB Pengakat Daerah

Target 51 (A) terealisasi 82,62 (A)

Nilai RB Perangkat Daerah di berdasar dari 8 area perubahan :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
1	Setda	31.67	52.02	83.69	A
2	RSUD Prof DR. Soekandar	32.67	50.85	83.52	A
3	Bagian Organisasi	30.11	53.21	83.32	A
4	Diskominfo	32.06	51.19	83.25	A
5	BKPSDM	31.15	51.70	82.85	A
6	Inspektorat	31.91	50.72	82.63	A
7	DP2KBP2	32.44	50.18	82.62	A
8	Kec Kemlagi	31.13	51.38	82.51	A
9	Kec Puri	34.11	48.33	82.44	A
10	DLH	32.51	49.75	82.26	A
11	DPMD	33.04	48.68	81.72	A
12	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	29.94	51.74	81.68	A
13	Bapenda	30.81	50.57	81.38	A
14	RSUD RA Basoeni	32.55	48.79	81.34	A
15	Kec Pungging	32.67	48.64	81.31	A

SASARAN KINERJA 3

Sasaran Kinerja yang ke 3 (tiga) yaitu Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.

Dari satu indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.**

Target 2 Inovasi terealisasi 1 Inovasi

DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>.

Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat P2TP2A terlebih dahulu.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

The screenshot shows a web browser displaying the 'Formulir Pengaduan Online' (Online Complaint Form) for 'RANGKUL KOREK PACARE'. The form is titled 'RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online)'. It includes a disclaimer stating that the form is for demonstration purposes and that the data entered will be used for identification and service provision. Below the disclaimer, there are three input fields: 'Email', 'Nama Pelapor' (Reporter Name), and 'Nomor Handphone Pelapor' (Reporter Phone Number). Each field has a 'Teks jawaban panjang' (Long text answer) label. The browser's address bar shows the URL 'https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk'.

REKAP KORBAN YANG SUDAH MELAPORKAN KASUS
KEKERASAN MELALUI GOOGLE FORM / INOVASI
RANGKUL KOREK PACARE

18 jawaban

Link ke Spreadsheet

Menerima jawaban

Ringkasan

Pertanyaan

Individual

Email

17 jawaban

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

@gmail.com

Nama Pelapor

18 jawaban

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN
				2020	2021		
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	$\frac{a}{b} \times 100 \%$ a. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	80,52%	80,87%	Program Penyuluhan dan Penggerakan	1. Pelayanan KIE 2. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 3. Penunjang DAK Bidang KB 4. Bantuan Operasional KB 5. Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera 6. Penunjang BOKB 7. Sosialisasi Program KKBPK untuk Wartawan 8. Pelatihan Metode KB bagi PUS 9. HARAGANAS 10. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 11. Pengadaan Sarana Prasarana (DAK Fisik)
						Program Keluarga Berencana	1. Peningkatan Akseptor KB 2. Pembinaan Akseptor KB 3. Kesatuan Gerak PKK - KB - Kesehatan 4. Peningkatan Mutu Pelayanan KB 5. Pelayanan KB MKJP
						Program Pengendalian Penduduk	1. Evaluasi Monitoring Program KB 2. Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga 3. Bintek Pencatatan dan Pelaporan Program KB 4. Penyusunan Parameter kependudukan dan profil kampung KB 5. Rakerda 6. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja Program KKBPK
2.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif	$\frac{a}{b} \times 100 \%$ a. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	73,27%	73,27%	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. BKB dan Evaluasi 2. BKR 3. BKL 4. Tribina kel. BKL terbaik 5. Advokasi dan KIE KRR 6. Pembinaan Kelompok UPPKS 7. Safari Ramadhan
						Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi Operasional Kabupaten Layak Anak 2. Peningkatan bagi SDM Paralegal 3. Fasilitasi P2TP2A

							4. Lomba Gugus Tugas PPA Desa 5. Fasilitasi Forum Anak 6. Monitoring PPRG 7. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG 8. Pelatihan Wirausaha bagi PEKKA 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 10. Operasional Rumah Aman
--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto

NO	IINDIKATOR	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prevalensi Peserta KB Aktif	-	-	-	80,52 %	80,00 %	80,00 %	80,62 %	80,55 %	-	-	Data di dapat berdasarkan jumlah PUS sebanyak 247.373 dan jumlah peserta KB aktif (yang ikut IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntuk dan Pil) sebanyak 199.545
2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif	-	-	-	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	-	-	Data di dapat berdasarkan jumlah kelompok Tribina, PIK R, UPPKS, Perlindungan Perempuan yang Aktif sebanyak 1.539 Kelompok dan Jumlah Kelompok yang Ada 2.174 Kelompok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2023 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.

2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.
4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)
2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.

7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Sedangkan Isu – Isu strategis strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	5.898.150.775	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	5.898.150.775	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5.367.570.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5.367.570.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	70,00%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	70,00%	-	

	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	288.258.375	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	288.258.375	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	150.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	150.000.000	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	83,93%	325.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	83,93%	325.000.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	57 OPD	165.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	57 OPD	165.000.000	
	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	100.000.000	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	100.000.000	

	Kabupaten/Kota										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	60.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	60.000.000	
3	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	199.056.575	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	199.056.575	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	199.056.575	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	199.056.575	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	96,00%	25.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	96,00%	25.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	25.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	25.000.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	44,44%	104.537.000	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	44,44%	104.537.000	
			Prosentase desa kelurahan layak anak	12,50%				Prosentase desa kelurahan layak anak	12,50%		
	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	40 desa/kec	104.537.000	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	40 desa/kec	104.537.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	42,86%	189.561.000	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	42,86%	189.561.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	189.561.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	189.561.000	
7	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga	100 %	1.620.369.850	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga	100 %	1.620.369.850	

			yang dilaporkan					yang dilaporkan			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.620.369.850	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.620.369.850	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	6.480.265.200	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	6.480.265.200	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	2 Media KIE	1.086.900.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	2 Media KIE	1.086.900.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	50 Org	1.712.438.200	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	50 Org	1.712.438.200	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang	42 Faskes	3.057.927.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang	42 Faskes	3.057.927.000	

			terlayani sesuai SOP					terlayani sesuai SOP			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Kampung KB	177 Kampung KB	623.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Kampung KB	177 Kampung KB	623.000.000	
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,91%	5.986.305.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,91%	5.986.305.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1066 Kelompok	5.986.305.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1066 Kelompok	5.986.305.000	
JUMLAH					20.828.245.400					20.828.245.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2024
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		
					-

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan makmur. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak – hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujudnya keluarga berkualitas.

Dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menitik beratkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan dimana penduduk bukan hanya sebagai obyek pembangunan tapi juga sebagai subyek sekaligus sebagai menikmati pembangunan, maka dalam hal ini :

1. Kualitas penduduk harus dikendalikan
2. Kualitas penduduk harus ditingkatkan
3. Mobilitas penduduk harus diarahkan dan
4. Data penduduk harus tersedia by name by adres

Dalam RPJMD 2015 – 2019 Pemerintah telah menerapkan 9 prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawacita dan yang berkaitan dengan program KB adalah **Nawacita ke – 3** “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka NKRI”, **Nawacita ke – 5** “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia “, Nawacita ke – 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa”.

Sebagai implementasi dari Nawacita tersebut ada Rencana Strategis 2016 - 2021 dan sasaran strategis yang harus di capai dan dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
2. Menurunnya angka TFR
3. Meningkatkan capaian peserta KB Aktif
4. Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terlayani
5. Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja kelompok umur 15 – 19 tahun
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (15 – 45 Tahun)

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata di semua tingkat wilayah.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

a. Tujuan

Maksud dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga para pelaksana pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan tujuan agar :

- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 adalah :

- Keluarga yang Berkualitas Melalui Pembangunan Keluarga

CASCADING KINERJA DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO									
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)									
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)									
INDIKATOR TUJUAN									
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)									
SASARAN									
KELUARGA YANG BERKUALITAS MELALUI PEMBANGUNAN KELUARGA									
INDIKATOR SASARAN									
Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				Kabupaten Layak Anak (KLA)		Prevalensi KB Aktif		Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Target : APE Madya				Target : KLA Madya		Target : 80,73 %		Target : 71,11 %	
PROGRAM (KINERJA ESELON II)									
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
INDIKATOR PROGRAM									
Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	Prosentase kecamatan layak anak	Prosentase desa/ kelurahan layak anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
Target :	Target : 100%	Target : 100%	Target :100%	Target : 100	Target :	Target : 100 %	Target : 100%	Target : 80,73%	Target : 95,49 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kegiatan:
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari kegiatan :

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari kegiatan :
- Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari kegiatan :
- Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari kegiatan :
- Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Pengendalian Peduduk terdiri dari kegiatan :

- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya local
 - Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber – KB
- i. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2	14	1				ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DP2KBP2	84,78 (A)	5.848.150.775			85,28 (A)	5.848.150.775
2	14	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	DP2KBP2	90%	12.700.000			90 %	12.700.000
2	14	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP2	5 Dokumen	7.500.000			5 dokumen	7.500.000
						Rincian :								
						Penggandaan dan penjilidan dokumen RENSTRA, RENJA.								

2	14	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	4 Laporan	5.000.000			4 Laporan	5.000.000
						Rincian :								
						Penggandaan dan penjiilidan dokumen Dokumen DPA, RKA, LKJIP dan SPPD								
2	14	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	DP2KBP2	87%	5.367.570.000			88 %	5.367.570.000
2	14	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP2KBP2	39 Orang/bulan	5.367.570.000			39/Orang/bulan	5.367.570.000
						Rincian :								-
						Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN								-
2	14	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP2KBP2	90%	228.258.375			90 %	228.258.375
2	14	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	23 Paket	36.612.000			23 Paket	36.612.000
						Rincian :								
						Beli Kursi Kerja Pejabat 3 unit dan Kursi Rapat 20 unit								
2	14	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	240 Paket	12.000.000			240 kotak	12.000.000
						Rincian :								
						Makan minum rapat								

2	14	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DP2KBP2	4 Paket	25.000.000			4 Paket	25.000.000
						Rincian :								
						Cetak map, amplop, blanco dan lembar disposisi								
2	14	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP2KBP2	6 Dokumen	9.000.000			6 Dokumen	9.000.000
						Rincian :								
						Beli koran								
2	14	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DP2KBP2	4 Paket	33.721.375			4 paket	33.721.375
						Rincian :								
						Beli ATK								
2	14	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DP2KBP2	12 Laporan	7.000.000			12 Laporan	7.000.000
						Rincian :								
						Makan minum tamu								
2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP2	172 Laporan	104.925.000			172 Laporan	104.925.000
						Rincian :								
						Perjalanan dinas luar dan dalam daerah								
2	14	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	DP2KBP2	90%	139.622.400			90 %	139.622.400

2	14	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	75.000.000			12 Laporan	75.000.000
						Rincian :								
						Bayar listrik dan telpon								
2	14	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	64.622.400			12 Laporan	64.622.400
						Rincian :								
						Honor Tenaga Harian Lepas (THL)								
2	14	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	DP2KBP2	90%	150.000.000			90 %	150.000.000
2	14	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP2KBP2	176 Unit	105.000.000			176 unit	105.000.000
						Rincian :								
						Pajak Kendaraan roda dua dan roda 4 dan service kendaraan								
2	14	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	4 Unit	25.000.000			4 gedung	25.000.000
						Rincian :								

						Beli Cat untuk rehab gedung dan beli perlengkapan rumah tangga								
2	14	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	21 Unit	20.000.000			21 unit	20.000.000
						Rincian :								
						Service AC, printer sama PC								
2	08	02				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	DP2KBP2	83,93%	325.000.000			85,71%	325.000.000
2	08	02	2	01		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	DP2KBP2	57 OPD	165.000.000			57 OPD	165.000.000
2	08	02	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	57 Dokumen	55.000.000			58 Dokumen	55.000.000
						Rincian :						-	-	
						Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di DP2KBP2 (TEMATIK PUG)								

2	08	02	2	01	04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	57 Perangkat Daerah	110.000.000			57 Perangkat Daerah	110.000.000
						Rincian :								
						Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto (TEMATIK PUG)								
2	08	02	2	02		Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang potlitik,hukum,sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta	DP2KBP2	40 Orang	100.000.000			40 Orang	100.000.000
2	08	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	2 Dokumen	100.000.000			40 orang	100.000.000
2	08	02	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	DP2KBP2	90 orang	60.000.000			90 Orang	60.000.000

2	08	02	2	03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	DP2KBP2	18 Lembaga	60.000.000			18 Lembaga	60.000.000
						Rincian :								
						Bintek Peningkatan kapasitas organisasi perempuan dan perempuan pengambil kebijakan (TEMATIK PUG)								
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	DP2KBP2	100%	199.056.575			100%	199.056.575
2	08	03	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	DP2KBP2	65 lintas sektor	199.056.575			65 lintas sektor	199.056.575
2	08	03	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	4 Dokumen	199.056.575			4 Dokumen	199.056.575
						Rincian :								
						Honor P2TP2A (honor penjaga selter, psikolog, pengacara, admin website) Honor PPTK (TEMATIK PUG)							-	-

2	08	05				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	DP2KBP2	95,83%	25.000.000			97,92%	25.000.000
2	08	05	2	01		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	DP2KBP2	1 buku	25.000.000			1 Buku	25.000.000
2	08	05	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DP2KBP2	1 Dokumen	25.000.000			1 Dokumen	25.000.000
						Rincian :								
						Penyusunan profil data gender dan anak (TEMATIK KLA dan PUG)								
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	DP2KBP2	44,44%	104.537.000			50,00%	104.537.000
							Prosentase desa kelurahan layak anak	DP2KBP2	12,50%				14,47%	
2	08	06	2	01		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	DP2KBP2	304 Kecamatan	104.537.000			304 Kecamatan	104.537.000

2	08	06	2	01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP2KBP2	1 Organisasi	104.537.000			1 Organisasi	104.537.000
						Rincian :								
						Fasilitasi Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto (TEMATIK KLA)								
						Pelaksanaan lomba KLA tingkat Nasional (TEMATIK KLA untuk fasilitasi monitoring dan evaluasi KLA)								
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	42,86%	189.561.000			43,86%	189.561.000
2	08	07	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	DP2KBP2	30 orang	189.561.000			30 orang	189.561.000

2	08	07	2	01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	15 Perangkat Daerah	189.561.000			15 Perangkat Daerah	189.561.000
						Rincian :								
						Koordinasi lintas sektor dengan pembentukan FDG (TEMATIK KLA)								
						Untuk pelayanan terhadap korban kekerasan (TEMATIK KLA)								
						Sosialisasi kegiatan pencegahan kekerasan								
						Honor P2TP2A (Lembaga bantuan hukum, psikolog, pengacara, penerima dan pencatat pengaduan kasus), Honor PPTK, Honor Tim Keanggotaan P2TP2A, Beli ATK Kegiatan (TEMATIK KLA)								
						Sosialisasi Desa Layak Anak (TEMATIK KLA)								
2	14	02				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	DP2KBP2	100%	1.620.369.850			100%	1.620.369.850

2	14	02	2	02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		DP2KBP2	1.169.760 jiwa	1.620.369.850			1.169.760 jiwa	1.620.369.850
2	14	02	2	02	09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DP2KBP2	1 Laporan	64.200.000			1 Laporan	64.200.000
						Rincian :								
						DAK Non Fisik								
2	14	02	2	02	12	Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP2KBP2	2 Laporan	232.800.000			2 Laporan	232.800.000
						Rincian :								
						DAK Non Fisik								
2	14	02	2	02	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (APBD dan DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP2KBP2	5 Dokumen	1.323.369.850			5 Dokumen	1.323.369.850
						Rincian :								
						Pelatihan PKB/PLKB dalam pencatatan dan pelaporan data								
						Evaluasi Laporan Bangga Kencana (bentuk buku laporan) (APBD)								
2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	DP2KBP2	80,58%	6.480.262.200			80,59%	6.480.262.200

2	14	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	DP2KBP2	2 Media KIE	1.086.900.000			2 Media KIE	1.086.900.000
2	14	03	2	01	01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP2KBP2	12 Organisasi	120.000.000			12 Organisasi	120.000.000
						Rincian :								
						Rapat Peningkatan program Bangga Kencana dan Kespro kepada lintas sektor dan Koordinator PLKB								
2	14	03	2	01	04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (APBD dan DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	2 Dokumen	175.000.000			2 Dokumen	175.000.000
						Rincian :								
						Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (APBD)								
						Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (DAK NON FISIK)								

2	14	03	2	01	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (APBD dan DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP2KBP2	1 Laporan	234.000.000			1 Laporan	234.000.000
						Rincian :								
						2. Rakorcam, Rakordes, Minilok (DAK NON FISIK BOKB)								
2	14	03	2	01	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP2KBP2	2 Laporan	477.900.000			2 Laporan	477.900.000
						Rincian :								
						Meningkatkan kualitas pengelolaan program (Kader, Pokja Kampung KB, Penyuluh KB) di balai penyuluhan dan Kampung KB (Rapat lini lapangan, rapat operasional penyuluhan KB, pembinaan kader, pengolahan data, mamin, transport pertemuan, honor fasilitator, banner) (DAK NON FISIK)								

						Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP2KBP2	1 Laporan	80.000.000			1 Laporan	80.000.000
						Rincian :								
						Rapat pengendalian program KKBPK dan makan minum								
2	14	03	2	02		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	DP2KBP2	50 Orang	1.712.438.200			50 Orang	1.712.438.200
2	14	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP2KBP2	1 Organisasi	1.004.674.000			1 Organisasi	1.004.674.000
						Rincian :								
						Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD								
2	14	03	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	DP2KBP2	2 Unit	99.764.200			2 Unit	99.764.200
						Rincian :								
						Penunjang DAK Fisik								
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP2KBP2	1.828 Orang	608.000.000			1.828 Orang	608.000.000
						Rincian :								
						DAK Non Fisik								

2	14	03	2	03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	42 Faskes	3.057.927.000			42 Faskes	3.057.927.000
2	14	03	2	03	01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringannya (APBD dan DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	66.000.000			2 Laporan	66.000.000
						Rincian :								
						1. Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (APBD)								
						2. Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (DAK)								
2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD dan DAK NON FISIK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP2KBP2	108 Orang	1.532.098.000			108 Orang	1.532.098.000
						Rincian :								
						1. Tansport pengumpulan data di balai penyuluh KB								
						2. Biaya penggerakan dan pelayanan KB (jasa medis, biaya transport penggerakan, biaya transport pengganti tidak bekerja) (DAK NON FISIK)								

2	14	03	2	03	06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP2KBP2	6 Unit	1.436.000.000			6 Unit	1.436.000.000
						Rincian :								
						Perlengkapan balai penyuluh KB, Rehab balai penyuluh KB (Sisa yang belum di rehab 6 balai penyuluh) dan Power Aktif								
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Beencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	23700.000			2 Laporan	23700.000
						Rincian :								
						Rapat koordinasi bersama 43 Faskes								
2	14	03	2	04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat di Kampung KB	DP2KBP2	177 Kampung KB	623.000.000			177 Kampung KB	623.000.000
2	14	03	2	04	02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP2KBP2	1 Dokumen	9.000.000			1 Dokumen	9.000.000
						Rincian :								

						Interasi lintas sektor dalam pengembangan program Bangga Kencana (bersama kepala Desa Kampung KB)								
2	14	03	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	DP2KBP2	177 Kampung KB	614.000.000			177 Kampung KB	614.000.000
						Rincian :								
						Rapat pelaksanaan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB (rapat ketahanan keluarga, rapat pokja kampung KB, Transport pertemuan, honor fasilitator, ATK, leaflet)								
2	14	04				Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	DP2KBP2	97,91%	5.986.305.000			97,97%	5.986.305.000
2	14	04	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	DP2KBP2	1.066 Kelompok	5.986.305.000			1066 Kelompok	5.986.305.000

2	14	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	DP2KBP2	1.066 Kelompok	149.842.000				1.066 Kelompok	149.842.000
						Rincian :									
						Lomba Duta Genre dan Pembinaan Duta Genre									
2	14	04	2	01	02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	DP2KBP2	20 Unit	360.000.000				20 Unit	360.000.000
						Rincian :									
						Pengadaan Catin KIT									
2	14	04	2	01	05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)(DAK NON FISIK)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	2.586 Kader	5.426.463.000				2.586 Kader	5.426.463.000

					Rincian :									
					Pulsa Paket Data, Transport TPK setiap kali kunjungan @ 10.00 x 2.586 Orang, (Transport pendampingan catin, Transport pendampingan ibu hamil, Transport pendampingan pasca persalinan) (DAK NON FISIK) (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)									
					JUMLAH TOTAL				20.828.245.400					20.828.245.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 sesuai dengan aplikasi SIMREDA Kabupaten Mojokerto (usulan prioritas dan cadangan) dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 20.828.245.400,00** (Dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD
Kabupaten Mojokerto

KODE SKPD								2.08.01												
NAMA SKPD								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
								PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN												
KODE									U P	B/ L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
											OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	K L	Rp.	D/TB /DAK
1								2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto	5.898.150.775				-		
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target		Kab. Mojokerto	12.700.000				-		
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto	7.500.000						
								Rincian :												
								Penggandaan dan penjilidan dokumen RENSTRA, RENJA.						Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
								Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto	5.200.000						
								Rincian :												
								Penggandaan dan penjilidan dokumen						Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						

							Dokumen DPA, RKA, LKJIP dan SPPD												
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		87%	Kab. Mojokerto	5.367.570.000				-	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	Kab. Mojokerto	5.367.570.000					
							Rincian :												
							Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90%	Kab. Mojokerto	228.258.375				-	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		23 Paket	Kab. Mojokerto	36.612.000					
							Rincian :												
							Beli Kursi Kerja Pejabat 3 unit dan Kursi Rapat 20 unit							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		240 Paket	Kab. Mojokerto	12.000.000					
							Rincian :												
							Makan minum rapat							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Kab. Mojokerto	25.000.000					
							Rincian :												
							Cetak map, amplop, blanco dan lembar disposisi							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					

							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen	Kab. Mojokerto	9.000.000						
							Rincian :													
							Beli koran							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	Kab. Mojokerto	33.721.375						
							Rincian :													
							Beli ATK							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
							Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	Kab. Mojokerto	7.000.000						
							Rincian :													
							Makan minum tamu							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		172 Laporan	Kab. Mojokerto	104.925.000						
							Rincian :							54.925.000 DAU						
							Perjalanan dinas luar dan dalam daerah							50.000.000 DAK						
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		90%	Kab. Mojokerto	139.622.400					-	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Kab. Mojokerto	75.000.000						

							Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (APBD dan DAK Non Fisik)			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		5 Dokumen	Kab. Mojokerto	1.323.369.850						
							Rincian :													
							1.Evaluasi Laporan Bangga Kencana (bentuk buku laporan) (APBD)							82.833.850 DAU 1.080.000.000 DAK 160.536.000 DID						
							2.Penunjang DAK Non Fisik (Penunjang DAK Non Fisik)													
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana		80,58%	Kab. Mojokerto	6.480.265.200						
							Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah media komunikasi program KKBPK		2 Media KIE	Kab. Mojokerto	1.086.900.000						
							Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		12 Organisasi	Kab. Mojokerto	120.000.000						
							Rincian :													
							Rapat Peningkatan program Bangga Kencana dan Kespro kepada lintas sektor dan Koordinator PLKB							DAK						

							Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 Laporan	Kab. Mojokerto	477.900.000						
							Rincian :													
							Meningkatkan kualitas pengelolaan program (Kader, Pokja Kampung KB, Penyuluh KB) di balai penyuluhan dan Kampung KB (Rapat lini lapangan, rapat operasional penyuluhan KB, pembinaan kader, pengolahan data, mamin, transport pertemuan, honor fasilitator, banner) (DAK NON FISIK)							DAK						
							Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	Kab. Mojokerto	80.000.000						
							Rincian :													
							Rapat pengendalian program KKBPK dan makan minum							DAK						
							Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)			Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK		50 Orang	Kab. Mojokerto	1.712.438.200						

[illegible]

							Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)(DAK NON FISIK)			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		2.586 Kader	Kab. Mojokerto	5.426.463.000						
							Rincian :													
							Pulsa Paket Data, Transport TPK setiap kali kunjungan @ 10.00 x 2.586 Orang, (Transport pendampingan catin, Transport pendampingan ibu hamil, Transport pendampingan pasca persalinan) (DAK NON FISIK) (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)							DAK						
							Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender		83,93%	Kab. Mojokerto	325.000.000					-	
							Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender		57 OPD	Kab. Mojokerto	165.000.000					-	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)		4 Dokumen	Kab. Mojokerto	55.000.000						

[illegible]

							Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO		65 orang	Kab. Mojokerto	199.056.575				-	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Kab. Mojokerto	199.056.575					
							Rincian :												
							Honor P2TP2A (honor penjaga selter, psikolog, pengacara, admin website) Honor PPTK (TEMATIK PUG)							Dana UMUM-Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak		96 %	Kab. Mojokerto	25.000.000				-	
							Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun		1 buku	Kab. Mojokerto	25.000.000				-	
							Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	Kab. Mojokerto	25.000.000					
							Rincian :												
							Penyusunan profil data gender dan anak (TEMATIK KLA dan PUG)							DAU					

								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Prosentase kecamatan layak anak		44,44%	Kab. Mojokerto	104.537.000					-	
											Prosentase desa kelurahan layak anak		12,50%	Kab. Mojokerto							
								Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA		40 Orang	Kab. Mojokerto	104.537.000					-	
								Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		27 Organisasi	Kab. Mojokerto	104.537.000						
								Rincian :													
								Fasilitasi Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto (TEMATIK KLA)							79.537.000 DAU 25.000.000 DAK						
								Program Perlindungan Khusus Anak			Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan		42,86%	Kab. Mojokerto	189.561.000					-	
								Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO		30 orang	Kab. Mojokerto	189.561.000					-	

							Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	189.561.000					
							Rincian :												
							Koordinasi lintas sektor dengan pembentukan FDG (TEMATIK KLA)							139.561.000 DAU 50.000.000 DAK					
							JUMLAH TOTAL							20.828.245.400					

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 – 2026 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandate kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

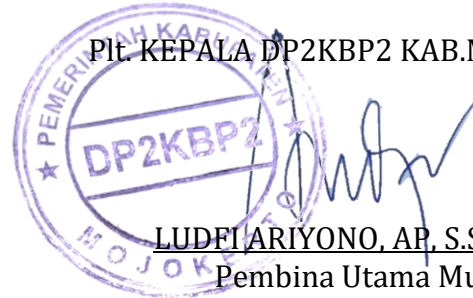
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, Mei 2023

PIL. KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO" at the top and "MOJOKERTO" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the text "DP2KBP2" is printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

LUDEFI ARIYONO, AP, S.Sos, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001